KABUPATEN
TABALONG

RENSTRA
TAHUN 2025-2029



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah maksimal 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 *tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah* (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

14. *Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong Nomor* 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun sekali.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang periodenya mengikuti periode Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025-2029 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Program dan Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Rancangan Renstra Perangkat Daerah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.

Pasal 5

Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dalam jangka waktu berlakunya Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila dalam waktu periodesasi Renstra Perangkat Daerah ini ada kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi dan/atau adanya *force mejure* yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan subtansi Renstra Perangkat Daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah yang penetapannya dengan menggunakan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah
2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD
3. Rencana Strategis Inspektorat Daerah
4. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
7. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Rencana Strategis Dinas Kesehatan
12. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Rencana Strategis Dinas Sosial
18. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja
19. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
20. Rencana Strategis Dinas Perhubungan
21. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
22. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
24. Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan
25. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
27. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
30. Rencana Strategis Kecamatan Tanjung
31. Rencana Strategis Kecamatan Murung pudak
32. Rencana Strategis Kecamatan Tanta
33. Rencana Strategis Kecamatan Muara Harus
34. Rencana Strategis Kecamatan Banua Lawas
35. Rencana Strategis Kecamatan Kelua
36. Rencana Strategis Kecamatan Pugaan
37. Rencana Strategis Kecamatan Jaro
38. Rencana Strategis Kecamatan Muara Uya
39. Rencana Strategis Kecamatan Haruai
40. Rencana Strategis Kecamatan Upau
41. Rencana Strategis Kecamatan Bintang Ara

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Jaksa Agung Suprapto, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kode Pos 71513
Laman: www.inspektorat.tabalongkab.go.id Pos el: inspektorat@tabalongkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025 - 2029

Kami telah mereviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 sesuai Pedoman Reviu. Substansi yang dimuat dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 menjadi tanggung jawab sepenuhnya manajemen DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Tabalong.

Reviu bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah telah disusun sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma berdasarkan kaidah- kaidah yang ditetapkan sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Tanjung, 18 September 2025
Plt. Inspektur Daerah,

Diyanto, SE, MT, FRMP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711013 200501 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Ir. P. H. M. Noor No.17B Pembataan Kode Pos 71571 Telp / Faks : 0526-2024577
Email : p3ap2kb@tabalongkab.go.id Website: www.dp3ap2kb.tabalongkab.go.id

BERITA ACARA
TINDAK LANJUT HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

Pada hari *Jum'at* tanggal *Sembilan Belas* bulan *September* tahun *dua ribu dua puluh lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Diyanto, SE, MT
   NIP : 19711013 200501 1 005
   Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/ b)
   Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong
2. Nama : Ach. Rahadian Noor, S.STP, M.Si
   NIP : 19780910 199711 1 001
   Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/ c)
   Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

Telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sesuai Catatan Hasil Reviu, dengan hasil sebagai berikut:

Catatan Hasil Reviu/ Saran Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1. Keterhubungan kinerja, Indikator dan target kinerja rancangan akhir renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat	Bahwa Indikator Angka Kelahiran Total (Total Ferryility Rate/ TFR) : 1. sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri (INMEN) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman	Sesuai yang terdapat dalam tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci SIPD Renstra dan tabel 4.3 (BAB

Catatan Hasil Reviu/ Saran Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
Daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan) yang terkait Indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dianggap Tidak selaras IKD yang sumbernya dari program terlalu mikro	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tanggal 27 Maret 2025 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk dalam Program Pengendalian Penduduk. 2. Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome No. 2.m.1 urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).	IV) pada dokumen Renstra DP3AP2KB 2025-2029
2. Keterhubungan kinerja, Indikator dan target kinerja rancangan akhir renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan) yang terkait Indikator Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Bahwa Indikator Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Neer): 1. sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri (INMEN) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tanggal 27 Maret 2025 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk dalam Program Pengendalian Penduduk. 2. Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome No. 2.m.3 urusan Pengendalian	Sesuai yang terdapat dalam tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci sipd renstra dan tabel 4.3 (BAB IV) pada dokumen Renstra DP3AP2KB 2025-2029

Catatan Hasil Reviu/ Saran Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	Penduduk dan Keluarga Berencana).	
3. Konsistensi dan Keterhubungan antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029 terkait Program Penunjang bukan merupakan program prioritas	Telah diperbaiki / disesuaikan dengan mentagging ulang terhadap program prioritas pembangunan daerah baik pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Renstra, maupun pada dokumen renstranya serta sudah disesuaikan dengan Tabel 3.8 RPJMD.	Terdapat dalam tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas SIPD Renstra, Tabel 3.8 RPJMD dan Tabel 4.5 (BAB IV) pada Dokumen Renstra DP3AP2KB 2025-2029
4. Konsistensi dan Keterhubungan antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029 terkait : - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (non Prioritas) - Program Perlindungan Perempuan (Non Prioritas) - Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Non Prioritas) - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (Non Prioritas) - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (Non Prioritas)	Telah diperbaiki / disesuaikan dengan mentagging ulang terhadap program prioritas pembangunan daerah baik pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Renstra, maupun pada dokumen renstranya serta sudah disesuaikan dengan Tabel 3.8 RPJMD.	Terdapat dalam tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas SIPD Renstra, Tabel 3.8 RPJMD dan Tabel 4.5 (BAB IV) pada Dokumen Renstra DP3AP2KB 2025-2029

Catatan Hasil Reviu/ Saran Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
- Program Perlindungan Khusus Anak 9Non Prioritas) - Program Pengendalian Penduduk (Non Prioritas) - Program Pembinaan Keluarga Berencana (Non Prioritas) - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (Non Prioritas)		
5. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra perangkat daerah periode 2020-2024 terkait : - Dasar Penetapan Baseline Renstra Pada Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Anak (IPA)	- Bahwa untuk Indikator kinerja Indeks Perlindungan Anak pada tahun sebelumnya angka yang tersedia baru untuk Provinsi Kalimantan Selatan, sementara angka untuk Kabupaten belum tersedia Sehingga DP3AP2KB terus berkoordinasi dengan Dinas PPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan. Indikator ini juga baru dijadikan sebagai IKU DP3AP2KB sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan anak dan Kualitas Keluarga. Indikator ini baru dijadikan Indikator Kinerja Utama sehingga tidak ada yang terkait.	- Sesuai yang tertera pada Tabel 4.3 Rencana Program/ Keglatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan pada SIPD Renstra dan Dokumen Renstra DP3AP2KB 2025-2029, Tabel 4.2 tentang Rencana Program /Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong.
- Dasar Penetapan Baseline Renstra pada Indikator Kinerja Indeks Pembangunan	- Bahwa Indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) indikator	- Sesuai yang tertera pada Tabel 4.3 Rencana Program/

Catatan Hasil Reviu/ Saran Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
Berwawasan Kependudukan (IPBK)	baru sehingga tidak ada yang terkait	Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan pada SIPD Renstra dan Dokumen Renstra DP3AP2KB 2025-2029, Tabel 4.2 tentang Rencana Program /Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong
- Dasar penetapan Baseline Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	- Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029 untuk mengukur Kualitas Keluarga berdasarkan aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagian. Keluarga yang berkualitas berperan penting dalam mencegah stunting, membentuk karakter anak dan menguatkan ketahanan sosial. Indikator ini baru dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama sehingga tidak ada yang terkait.	- Sesuai yang tertera pada Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan pada SIPD Renstra dan Dokumen Renstra DP3AP2KB 2025-2029, Tabel 4.2 tentang Rencana Program /Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong
- Penetapan Baseline Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	- Bahwa Indikator Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) indikator baru sehingga tidak ada yang terkait	- Sesuai yang tertera pada Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan pada SIPD Renstra dan Dokumen Renstra

Catatan Hasil Reviu/ Saran Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
		DP3AP2KB 2025-2029, Tabel 4.2 tentang Rencana Program /Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong
- Penetapan Baseline Nilai Pengenugerahan Parahita Ekapraya Daerah	- Bahwa Indikator Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah indikator baru sehingga tidak ada yang terkait	- Sesuai yang tertera pada Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan pada SIPD Renstra dan Dokumen Renstra DP3AP2KB 2025-2029, Tabel 4.2 tentang Rencana Program /Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong
- Baseline belum sesuai dengan Capaian 2024	- Telah diperbaiki / disesuaikan Capaian Tahun Terakhir dengan Baseline sudah selaras (Nilai AKIP BB)	- Sesuai yang tertera pada Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan pada SIPD Renstra dan Dokumen Renstra DP3AP2KB 2025-2029, Tabel 4.2 tentang Rencana Program /Kegiatan /Sub Kegiatan dan

Catatan Hasil Reviu/ Saran Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
		Pendanaan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong

Tanjung, 19 September 2025

Kepala SKPD,

ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP., M.Si
NIP. 19780910 199711 1 001

Plt. Inspektur Daerah
Kabupaten Tabalong,

DIYANTO, SE, MT
NIP. 19711013 200501 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029, yang disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen bersama yang dilandasi oleh nilai dan norma organisasi, serta dirumuskan melalui proses partisipatif yang mencerminkan pemahaman dan pandangan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) guna mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta berkontribusi secara langsung dalam mewujudkan visi dan misi

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong,

ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780910 199711 1 001

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

.1 Latar Belakang 1

2 Dasar Hukum Penyusunan 3

3 Maksud dan Tujuan 9

4 Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA **14**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 14

2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah 38

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 46

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 61

2.1.5 Kerjasama Daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah 61

2.2 Permasalahan Perangkat Daerah 63

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 63

2.2.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 65

2.3 Isu Strategis Perangkat Daerah 76

2.4 Kinerja Berdasarkan Indikator SDGs 81

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG..... 84

3.1 Tujuan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong..... 85

3.2 Sasaran Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong..... 86

3.3 Strategi Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong..... 87

3.4 Arah Kebijakan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong..... 94

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 104

4.1 Rencana Program..... 104

4.2 Rencana Kegiatan..... 111

4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan..... 132

4.4 Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas..... 167

4.5 Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB..... 171

4.6 Indikator Kinerja Kunci DP3AP2KB..... 173

BAB V PENUTUP..... 174

DAFTAR TABEL

1. Jumlah SDM DP3AP2KB Kabupaten Tabalong Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025..... 38
2. Jumlah SDM, PPPK dan Non ASN DP3AP2KB Kabupaten Tabalong Berdasarkan Golongan/ ruang Tahun 2025..... 39
3. Jumlah SDM ASN, PPPK DAN NON ASN DP3AP2KB Kabupaten Tabalong Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 40
4. Proyesi Kebutuhan Pegawai 5 (Lima) Tahun ke Depan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana……... 40
5. Daftar Prasarana dan Sarana di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong..... 42
6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2024..... 47
7. Anggaran dan realisasi pendanaan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2024..... 51
8. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong…… 68
9. Penyusunan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong..... 77
10. Matrik TPB.SDGs Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong…… 81

11. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong…….. 89
12. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong..... 90
13. Tahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana…… 92
14. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong…… 95
15. Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong…….. 107
16. Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong……..... 115
17. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029……. 132
18. Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong……..... 167
19. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong…… 171

20. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong..... 173

DAFTAR GAMBAR

1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong..... 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 ayat 1 berbunyi “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Sebagaimana disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (29) dan Lebih lanjut, penyusunan dokumen ini mengikuti arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 ini dibuat. Selama periode 5 (lima) tahun, dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di lingkungan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini, digunakan beberapa metode berikut ini :

1. Teknokratik : Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah;
2. Partisipatif : Pelibatan berbagai pemangku kepentingan;
3. Politis : Penerjemahan visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD;
4. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) selaras antar musrembang desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional;
5. Selaras antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya setelah Renstra disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan sebagai Peraturan daerah, maka langkah berikutnya adalah penetapan dokumen tersebut menjadi renstra PD sebagai Peraturan Bupati.

Setelah dokumen Renstra ini ditetapkan oleh Bupati sebagai Perbup, maka Renstra akan dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Renja OPD, dan Renja OPD inilah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang termuat dalam Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong serta di dalam Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tabalong.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana. Demikian tadi uraian tentang segala sesuatu yang menjadi latar belakang penyusunan dokumen Rencana Strategis ini yang selanjutnya akan diuraikan pada landasan hukumnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra DP3AP2KB Tahun 2025 – 2029 ini, peraturan yang menjadi landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pekerjaan Terburuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahu 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;

26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Rancangan Awa latas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Instruksi Menteri dalam Negeri No. 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 078);
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 109);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7);
40. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
41. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 41);
42. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 04);
43. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 07);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Tabalong 2025-2029 dimaksudkan untuk :

1. Melakukan peninjauan ulang terhadap isu-isu strategis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Melakukan evaluasi capaian sasaran program dan kegiatan yang telah dijalankan di Tahun 2022-2025 pada Renstra;
3. Merumuskan kembali sasaran yang ingin dicapai untuk tahun 2025-2029 dalam rangka untuk mengatasi isu-isu aktual dan strategis sehingga mempercepat pencapaian sasaran RPJMD periode 2025-2029;
4. Melakukan Perubahan strategi DP3AP2KB dengan menambahkan program dan kegiatan baru sebagai dasar pelaksanaan perencanaan kerja DP3AP2KB Tahun 2025-2029 Renstra;
5. Sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh potensi DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dalam peningkatan pemberdayaan perempuan guna mewujudkan kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan hak-hak anak pada aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi serta meningkatkan ketahanan (ketentraman, kemandirian dan kebahagian) keluarga.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra DP3AP2KB 2025-2029 adalah Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antara RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2029 dan Renstra DP3AP2KB 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan Penulisan Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra,

fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Rencana Kerja (Renja) perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta Susunan garis besar isi

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdiri Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan, dan Kerjasama Daerah yang dilaksanakan perangkat daerah.

2.2 Permasalahan Perangkat Daerah

Memuat identifikasi permasalahan perangkat daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong, Penyelerasan antara RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dengan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat identifikasi isu strategis perangkat daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong, Penyelerasan antara RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dengan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong.

Pada bagian ini dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

2.4 Kinerja Berdasarkan Indikator SDGs

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap keterkaitan kinerj perangkat daerah yang menunjang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistainable Development Goals (TBP/SDGs).*

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah

Kebijakan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong. Tujuan tersebut menjelaskan tentang hubungan antara Misi Kepala Daerah dengan tujuan tindak lanjut DP3AP2KB dalam pencapaian Misi Kepala Daerah.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang diampu oleh perangkat daerah yang memuat penjabaran dari rencana program, keterkaitan sasaran RPJMD dan sasaran Renstra, rencana pendanaan, indikator kinerja utama perangkat daerah dan indikator kinerja kunci perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang uraian seluruh bab-bab yang ada pada sebelumnya, disertai dengan harapan-harapan dalam mengimplementasikan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dan harapan pada periode akhir Renstra DP3AP2KB.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DP3AP2KB Kabupaten Tabalong. Bahwa tugas pokok DP3AP2KB Kabupaten Tabalong adalah melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. DP3AP2KB Kabupaten Tabalong merupakan salah satu dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Tabalong.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DP3AP2KB Kabupaten Tabalong mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
b. Pelaksanaan Kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;

d. Pelaksanaan administrasi bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
e. Pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Merumuskan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
b. Melaksanakan Kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;

d. Melaksanakan administrasi bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
f. Mengelola kegiatan kesekretariatan, dan
g. Melaksanakan tygas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Unsur-unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :

a. Sekretariat;
b. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
e. Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
f. UPTD; dan

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi setiap unit kerja berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Sekretariat
   1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, menyusun, membina, mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran, rencana strategis, laporan evaluasi dan laporan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset,

pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga, pengadministrasian kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan humas dan protokol Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
   a) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian rencana kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   b) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   c) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian laporan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   d) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   e) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
   f) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
   g) Pengoordinasian, penyusunan program. Pembinaan dan pengendalian pengadministrasian kepegawaian;

h) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi dan tata laksana;

i) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan humas dan protokol Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a) Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b) Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c) Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan laporan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

d) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengeloiaan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

e) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset;

f) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;

g) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadministrasian kepegawaian;
h) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
i) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan humas dan protokol Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
j) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai Bidang tugas dan kewenangannya.

4) Sekretariat terdiri atas :

a) Subbagian Perencanaan

1) Subbagian Perencanaan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan urusan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b) Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran;

c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Rencana Strategis yaitu menyusun Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun;
d) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan tahunan yaitu Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan;
e) Menyiapkan bahan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, Rencana Kerja Anggaran, Monitoring evaluasi rencana anggaran;
f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Realisasi Capaian Kinerja (triwulan, semester dan tahunan) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b) Subbagian Keuangan

1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan urusan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a) Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan Kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c) Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan;
d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan serta penatausahaan aset;
e) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
f) Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
g) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
h) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian

Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b) Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
   c) Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa/usul ujian dinas, usul pencantuman gelar, usul pelaksana Tugas/Pelaksana Harian, usul Jabatan Fungsional, usul pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Usul penyesuaian masa kerja, Usul Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Monev E-SKP, Monev E-Kinerja, pemberhentian dan pensiun pegawai;
   d) Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
   e) Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
   f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
   g) Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
   h) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
   i) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
   j) Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
   k) Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

l) Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

m) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;

n) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan

1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pengembangan dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

b. Persiapan bahan penyusunan, dan penyajian kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;

c. Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;

d. Persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;

e. Persiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;

f. Persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan;

g. Persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi dan seupervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
h. Persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
i. Persiapan bahan dan pengembangan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
j. Persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan. Informasi kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
k. Persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
l. Persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
m. Persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
n. Persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan.

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
c. Menyiapkan bahan menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
d. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;

e. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan;
h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan seupervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
i. Menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
j. Menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
k. Menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi Bidang Pemberdayaan Perempuan;
l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
n. Menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan

o. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tuga dan kewenangannya.

c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pengembangan dan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan penyusunan, dan penyajian kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
   b. Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
   c. Persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
   d. Persiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
   e. Persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
   f. Persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi dan seupervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
   g. Persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

h. Persiapan bahan dan pengembangan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
i. Persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan. Informasi kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
j. Persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
k. Persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
l. Persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak ; dan
m. Persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
b. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan seupervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
g. Menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
h. Menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
i. Menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ;
k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
l. Menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
m. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tuga dan kewenangannya.

d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga

1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pengembangan dan Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Sistem data Informasi Keluarga.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga mempunyai fungsi :

a. Persiapan bahan penyusunan, dan penyajian kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
b. Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
c. Persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
d. Persiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
e. Persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
f. Persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi dan seupervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
g. Persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
h. Persiapan bahan dan pengembangan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;

i. Persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan. Informasi kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
j. Persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
k. Persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
l. Persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
m. Persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga ;
b. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem data Informasi Keluarga;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan seupervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
g. Menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
h. Menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
i. Menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga ;
k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
l. Menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga; dan

m. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tuga dan kewenangannya.

e. Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga

1) Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pengembangan dan Peningkatan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

a. Persiapan bahan penyusunan, dan penyajian kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;

b. Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;

c. Persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;

d. Persiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;

e. Persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;

f. Persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi dan seupervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
g. Persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
h. Persiapan bahan dan pengembangan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
i. Persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan. Informasi kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
j. Persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
k. Persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
l. Persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
m. Persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan menyusun rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;

b. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan seupervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
g. Menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
h. Menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
i. Menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;

l. Menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga; dan

m. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tuga dan kewenangannya.

f. UPTD

Ketentuan tentang pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Beserta Uraian tugas, pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

g. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengann bidang keahliannya.
2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3) Jenis, jenjang tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

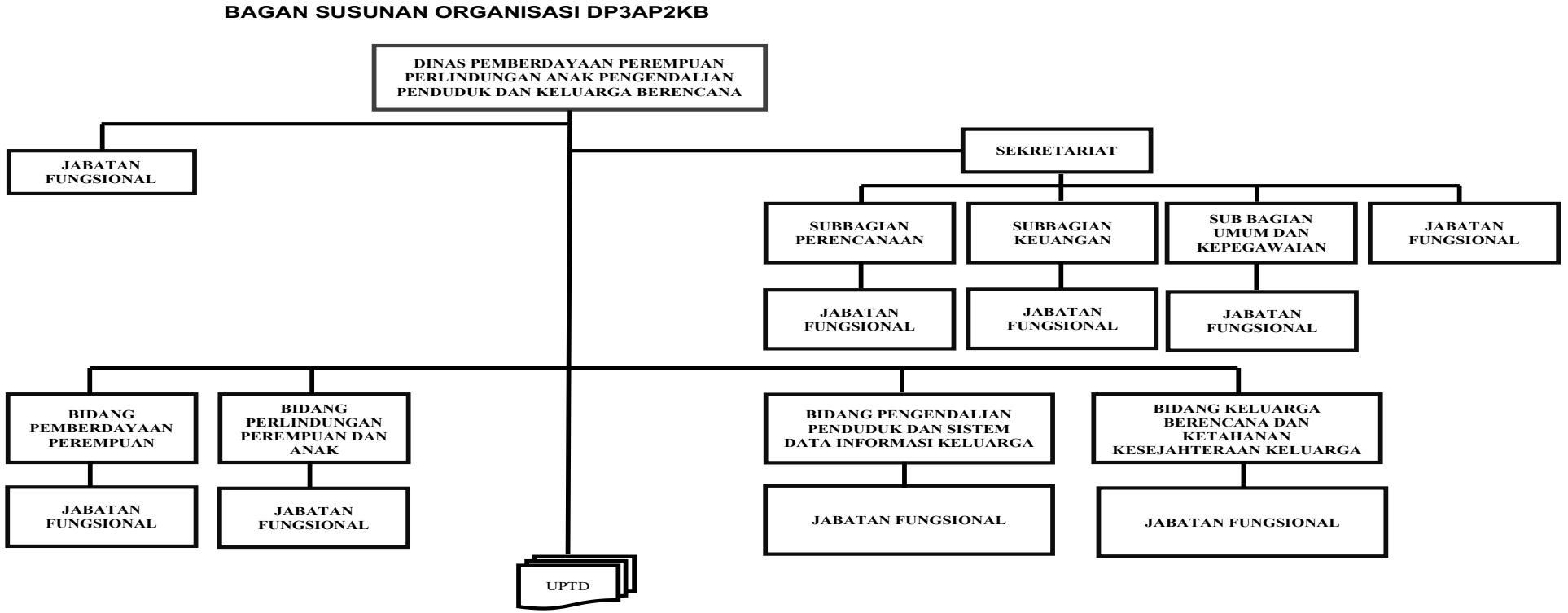
(1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi DP3AP2KB Kabupaten Tablong berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 terdiri dari 1 (satu) eselon II, 5 (lima) eselon III terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) eselon IV Sekretariat, 1 UPTD dan kelompok fungsional sebagaimana gambar bagan berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)

PERATURAN BUPATI TABALONG NO. 69 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong



2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu Sekerataris serta 4 orang Kepala Bidang, kemudian Sekretaris dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bagian, sedangkan Kepala Bidang masing-masing dibantu oleh Pejabat Fungsonal.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tabalong adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bidang dan Sekretaris adalah Pejabat Administrator serta Kepala Sub Bagian adalah Pejabat Pengawas dan masing-masing pejabat pengawas dibantu oleh tenaga pelaksana yang berstatus PNS, PPPK dan Non PNS Tahun 2025 dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah SDM DP3AP2KB Kabupaten Tabalong
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Kepala Dinas/ Sekretariat/ Bidang	JPT Pratama		Administrator		Pengawas dan Fungsional Penyetaraan		JFU		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Sekretariat	-	-	-	1	-	3	1	1	1	5
3.	Bidang PP	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4
4.	Bidang PPA	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
5.	Bidang Dalduk & SDIK	-	-	1	-	-	2	1	-	2	2
6.	Bidang KB & KS	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2
7.	UPTD PPA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
TOTAL		**1**	**-**	**2**	**2**	**-**	**10**	**2**	**4**	**5**	**16**

Tabel 2.2

Jumlah SDM ASN, PPPK dan Non ASN DP3AP2KB Kabupaten Tabalong

Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2025

No.	Golongan	SET	PP	PPA	Dalduk & SDIK	KB & KS	UPTD PPA	Jumlah
1.	IV/c	1	0	0	0	0	0	1
2.	IV/b	0	0	0	0	0	0	0
3.	IV/a	1	0	1	1	0	0	3
Jumlah Gol IV		**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**4**
4.	III/d	1	3	0	2	2	0	8
5.	III/c	2	0	1	0	0	1	4
6.	III/b	0	0	0	0	0	0	0
7.	III/a	1	0	0	0	0	0	1
Jumlah Gol III		**4**	**3**	**1**	**2**	**2**	**1**	**13**
8.	II/d	0	0	0	1	0	0	1
9.	II/c	1	0	0	0	0	0	1
10.	II/b	0	1	0	0	0	0	1
11.	II/a	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Gol II		**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**
12.	IX (PPPK)	2	1	1	1	1	1	7
Jumlah Gol IX		**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**7**
13.	Non PNS	5	3	1	0	1	1	11
Jumlah Non PNS		**5**	**3**	**1**	**0**	**1**	**1**	**11**
TOTAL PEGAWAI		**14**	**8**	**4**	**5**	**4**	**3**	**38**

Apabila dilihat dari struktur tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh sumber daya manusia pada DP3AP2KB Kabupaten Tabalong, maka hal ini didominasi oleh SDM dengan tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) dibandingkan dengan tingkat pendidikan formal lainnya dan untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah SDM ASN, PPPK DAN NON ASN DP3AP2KB

Kabupaten Tabalong Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SLTP ke bawah	2
2.	SLTA	7
3.	Diploma 1	-
4.	Diploma 2	-
5.	Diploma 3	2
6.	Diploma 4	1
7.	Sarjana S-1	22
8.	Master/ Pasca Sarjana	4
Jumlah		**38**

Tabel 2.4

Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (Lima) Tahun ke Depan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

No	Nama Jabatan	Bezetting (Kondisi Pegawai Saat Ini)	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi				
				Pegawai yang Dibutuhkan				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Penelaah Teknis Kebijakan	3	10	2	-	2	-	3
2	Penata Layanan Operasional	6	6	-	-	-	-	-
3	Konselor SDM	0	1	1	-	-	-	-
4	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	2	1	-	-	1	-

No	Nama Jabatan	Bezetting (Kondisi Pegawai Saat Ini)	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi				
				Pegawai yang Dibutuhkan				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5	Pengolah Data dan Informasi	1	9	2	1	2	1	2
6	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	2	-	1	-	1	-
7	Pengadministrasi Perkantoran	1	8	1	-	1	-	1
8	Perencana Ahli Pertama	0	1	-	1	-	-	-
9	Perencana Ahli Muda	0	1	-	-	-	-	-
10	Analis Kepegawaian Ahli Pertama	0	1	1	-	-	-	-
11	Analis Kepegawaian Ahli Muda	0	1	-	-	-	-	-
12	Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	5	3	-	1	-	1
13	Analis Kebijakan Ahli Muda	4	5	1	-			
14	Analis Kebijakan Ahli Madya	0	5	-	-	-	-	-
15	Penata Kependudukan dan KB Ahli Pertama	0	4	-	-	-	-	-
16	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	2	2	2	-	-	-	-
17	Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya	0	4	2	-	-	-	-
18	Pranata Komputer Terampil	0	2	1	-	1	-	-
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	0	2	-	1	-	1	-
20	Pranata Komputer Ahli Muda	0	2	-	-	-	-	-
21	Pranata Komputer Ahli Madya	0	2	-	-	-	-	-
22	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	-	-	-	-	-
23	Arsiparis Ahli Muda	0	1	-	-	-	-	-
24	Arsiparis Ahli Madya	0	1	-	-	-	-	-
25	Analis Hukum Ahli Pertama	0	1	1	-	-	-	-

No	Nama Jabatan	Bezetting (Kondisi Pegawai Saat Ini)	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi				
				Pegawai yang Dibutuhkan				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
26	Analis Hukum Ahli Muda	0	1	-	-	-	-	-
27	Analis Hukum Ahli Madya	0	1	-	-	-	-	-
28	Psikolog Klinis Ahli Pertama	0	1	1	-	-	-	-
29	Psikolog Klinis Ahli Muda	0	1	-	-	-	-	-
30	Psikolog Klinis Ahli Madya	0	1	-	-	-	-	-
31	Pengelola PBJ Ahli Pertama	0	1	1	-	-	-	-
32	Pengelola PBJ Ahli Muda	0	1	-	-	-	-	-

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi DP3AP2KB Kabupaten Tabalong didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5

Daftar prasarana dan sarana di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

No.	Nama Barang	Jumlah (bh)	Keterangan
1.	Software Lainnya	1	Baik
2.	P.C Unit	9	Baik
3.	Laptop	49	Baik
4.	Komputer Unit Lainnya	1	Rusak
5.	Printer (Peralatan Personal komputer)	60	Baik
6.	Peralatan Personal Komputer Lainnya	16	Baik
7.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	2	Baik
8.	Lemari Besi/Metal	1	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah (bh)	Keterangan
9.	Filing Cabinet Besi	14	Baik
10.	Brandkas	1	Rusak Berat
11.	Lemari Kaca	3	Baik
12.	CCTV- Camera Control Television System	1	Baik
13.	Papan Visual/ Papan Nama	2	Baik
14.	LCD Projector/Infocus	1	Baik
15.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
16.	Papan Nama Instansi	2	Baik
17.	Alat Kantor Lainnya	12	Baik
18.	Meja Kerja Kayu	1	Baik
19.	Kursi Putar	1	Baik
20.	Kursi Lipat	60	Baik
21.	Kipas Angin	2	Baik
22.	Sofa	3	Baik
23.	Meubeleur Lainnya	1	Baik
24.	Lemari Es	3	Baik
25.	A.C Window	1	Baik
26.	A.C Split	8/1	Baik/Rusak Berat
27.	Treng Air/ Tandon Air	1	Rusak Ringan
28.	Televisi	5	Baik
29.	Sound System	3/1	Baik/Rusak Berat
30.	Mic Wireless	1	Baik
31.	Camera Video	1	Baik
32.	Tiang Bendera	2	Baik
33.	Tangga Aluminium	1	Rusak
34.	Dispenser	1	Rusak Ringan

No.	Nama Barang	Jumlah (bh)	Keterangan
35.	Karpet	1	Baik
36.	Gordynin/Kray	1	Baik
37.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
38.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
39.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	Baik
40.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13/3	Baik/Rusak Berat
41.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	7	Baik
42.	Meja Rapat Pejabat Eselon II	3	Baik
43.	Meja Rapat Pejabat Lainnya	8	Baik
44.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
45.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	11	Baik
46.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	Baik
47.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	7	Baik
48.	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	3	Rusak
49.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Baik
50.	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	Baik
51.	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	Baik
52.	Lemari Buku untuk Pejabat Lainnya	2	Baik
53.	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	15	Baik
54.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2/3	Baik/Rusak
55.	Camera Electronic	1	Baik
56.	Layar Film/ Projector	3	Baik
57	Camera Digital	2	Baik
58.	Telephone Mobile	3	Baik
59.	Alat Kedokteran Keluarga Berencana Lainnya (dst)	10	Baik
UPTD DP3AP2KB KECAMATAN/ BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN			

No.	Nama Barang	Jumlah (bh)	Keterangan
60.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11/24	Baik/Rusak Berat
61.	Lemari Besi/Metal	14	Baik
62.	Meja Kerja Kayu	12/1	Baik/Rusak Ringan
63.	Kursi Biasa	12	Baik
64.	Publik Address (Lapangan)	12	Rusak Berat
65.	Kipas Angin	11/1	Baik/Rusak
66.	Rak Besi	2	Baik
67.	White Board	2	Baik
68.	Meja Rapat	2	Baik
69.	A.C Window	2	Baik
70.	Hard Disk	3	Rusak
SARANA MOBILITAS DP3AP2KB			
71.	Toyota Minibus Innova	1	Baik
72.	Toyota Minibus Innova	1	Proses Lelang
73.	Toyota Rush	1	Baik
74.	Toyota Avanza	1	Kurang Baik
75.	Toyota Avanza	1	Baik
76.	Toyota Hilux	1	Baik
77.	Toyota Hi Ace	1	Baik
78.	Daihatsu/Luxio 1.5X M/T	1	Baik
79.	Mitsubishi Toyota	1	Proses Lelang
80.	Sepeda Motor	42	Baik
81.	Sepeda Motor	4	Proses Lelang
82.	Sepeda Motor	2	Bermasalah

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah tuntutan reformasi sebagai amanat yang harus dilaksanakan, utamanya oleh aparatur penyelenggara pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut pada dasawarsa ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik. Momentum ini menjadi sebuah acuan untuk berbenah guna menghasilkan pelayanan prima dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dalam menunjang kinerja pelayanan perangkat daerah, DP3AP2KB Kabupaten Tabalong secara sinergis menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang secara bersama-sama berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan kualitas keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Adapun capaian kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong terbuat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2021 - 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra DP3AP2KB Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio capaian pada tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1.	Persentase ARG pada Belanja APBD	16 %	20 %	25 %	30 %	4 %	3,41 %	18 %	52,34 %	25 %	15,7 %	72 %	174,47 %
2.	Persentase SKPD yang Responsif Gender	100 %	100 %	100 %	100 %	52,4 %	90,5 %	100 %	100 %	52,4 %	90,5 %	100 %	100 %
3.	IDG	72,51	73,38	74,25	75,12	73,40	74,65	74,60	72,54 %	101,23 %	101,73 %	100,47 %	96,57 %
4.	Jumlah SKPD yang Responsive Gender	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	22 SKPD	42 SKPD	41 SKPD	41 SKPD	52,38 %	100 %	100 %	100 %
5.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	30 %	30 %	30 %	30 %	26,67 %	26,67 %	23,33 %	26,27 %	88,9 %	88,9 %	77,77 %	88,9 %
6.	Jumlah Desa Sadar Hukum	24 Desa	24 Desa	48 Desa	60 Desa	24 Desa	24 Desa	48 Desa	60 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	IPG	85,53	85,72	85,91	86,1	85,34	85,48	86,06	86,47	99,78 %	99,72 %	100,17 %	101,16 %
10.	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11.	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	5	7	10	10	5	4	6	12	100 %	57,14 %	100 %	120 %
12.	Persentase SKPD yang Mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13.	Jumlah SKPD yang Membuat Data Terpilah Gender dan Anak	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %
14.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannnya Pada Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra DP3AP2KB Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio capaian pada tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	***2***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***	***15***	***16***	***17***
	Pelayanan Terpadu												
15.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
16.	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
17.	Persentase Penanganan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
18.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	100 %	100 %	100 %	-
19.	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
20.	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
21.	Indeks Perlindungan Anak	68	68,01	68,02	68,03	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan terpadu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
23.	Pencegahan Perkawinan Usia Anak	21	33	45	57	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Sosialisasi dan Pembentukan PATBM	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
25.	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
26.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,47 %	1,46 %	1,45 %	1,44 %	1,40 %	1,73 %	1,37 %	1,32 %	95,24 %	118,49 %	94,48 %	94,29 %
27.	Indeks Pembangunan Keluarga	58,2	60,32	60,44	64,55	53,42	53,42	66,24	67	91,79 %	88,56 %	109,59 %	96,34 %
28.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Sfcific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28	34	32	29	-	41,3	29,37	12,6	-	121,47 %	91,78 %	43,45 %
29.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	-	3	3	3	-	1	1	1	-	33,33 %	33,33 %	33,33 %

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra DP3AP2KB Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio capaian pada tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	***2***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***	***15***	***16***	***17***
	Per WUS Usia 15-49 Tahun)												
30.	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbentuk	3	6	8	8	3	6	8	10	100 %	100 %	100 %	100 %
31.	Rapat/ Pertemuan Program Bangga Kencana	90	90	90	90	35	35	35	105	38,89 %	38,89 %	38,89 %	116,67 %
32.	Jumlah Anak Sekolah yang Memahami Manfaat Pendewasaan usia Perkawinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
33.	Persentase Pelaporan Tepat Waktu	14,50 %	15,25 %	17,50 %	20 %	13,07 %	13,25 %	13,50 %	13,58 %	90,14 %	86,88 %	77,14 %	67,9 %
34.	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	82,05 %	82,11 %	82,19 %	82,28 %	79,12 %	79,22 %	79,30 %	79,32 %	96,43 %	96,48 %	96,48 %	100,25 %
35.	Cakupan Peserta KB yang Aktif	82,05 %	82,11 %	82,19 %	82,28 %	79,12 %	79,22 %	79,26 %	79,32 %	96,43 %	96,48 %	96,44 %	96,40 %
36.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	80%	82 %	87 %	90 %	80 %	82 %	87,80 %	83,36 %	100 %	100 %	100,92 %	92,62 %
37.	Persentase UPPKS yang Aktif	84 %	87,8 %	91,6 %	95,4 %	100 %	84 %	100 %	95,4 %	119,05 %	95,67 %	109,17 %	100 %
38.	Persentase PPKBD yang Aktif	61,2 %	62,3 %	64,1 %	66,9 %	100 %	61,20 %	100 %	99,74 %	163,39 %	98,23 %	156,00 %	149,09 %
39.	Persentase Sub PPKBD Aktif	80,29 %	80,30 %	80,56 %	81,80 %	79,12 %	-	79,3 %	77,74 %	98,54 %	-	98,44 %	95,04 %
40.	Persentase KB Aktif	80,29 %	80,30 %	80,56 %	81,80 %	79 %	-	81,31 %	80,56 %	98,39 %	-	100,93 %	98,48 %
41.	Persentase Akseptor Pada Kampung KB	73,80 %	75,83 %	77,90 %	80 %	81,83 %	94,32 %	78,65 %	89,61 %	110,88 %	124,38 %	100,96 %	112,01 %
42.	Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB (BKB, BKR, BKL)	91,45 %	91,60 %	91,75 %	92 %	89,70 %	71,49 %	91,89 %	92,02 %	98,09 %	78,05 %	100,15 %	100 %
43.	Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95,04 %	73,57 %	100 %	100 %	95,04 %	73,57 %	100 %
44.	Persentase BKB yang Aktif	54 %	60,3 %	69 %	80 %	100 %	84,04 %	61,06 %	80 %	148,22 %	139,37 %	88,49 %	100 %
45.	Persentase BKR yang Aktif	65 %	73 %	84 %	97 %	100 %	79,31 %	54,87 %	80 %	122,01 %	108,64 %	65,32 %	82,47 %
46.	Persentase BKL yang Aktif	80 %	82 %	87 %	90 %	80 %	80 %	87,80 %	90 %	100 %	97,56 %	100,92 %	100 %
47.	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	BB	BB	BB	A	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
48.	Kategori SAKIP	77	78	79	80	77,48	77,13	77,95	78,55 %	100,62 %	98,88 %	98,67 %	97,44 %

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra DP3AP2KB Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio capaian pada tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	***2***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***	***15***	***16***	***17***
49.	Nilai SAKIP	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %
50.	Jumlah Dokumen Perencaaan dan Realisasi Kinerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %
51.	Laporan Keuangan diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
52.	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
53.	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
54.	Persentase Kepuasan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor	-	-	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %
55.	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16	20	25	30	4	3,41	18	52,34 %	25 %	17,05 %	72 %	60 %

Tabel 2.7

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2024 (periode Renstra Perubahan)

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	495.030.128	330.600.464	580.984.241	685.058.500	489.936.765	300.259.980	523.310.250	640.733.357	98,97%	90,82%	90,07%	93,53%	2.091.673.333	1.954.240.352
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	118.491.961	72.619.988	221.926.053	283.396.578	114.985.921	62.859.108	185.512.756	268.206.980	97,04%	86,56%	83,59%	94,64%	696.434.580	631.564.765
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	118.491.961	72.619.988	221.926.053	283.396.578	114.985.921	62.859.108	185.512756	268.206.980	97,04%	86,56%	83,59%	94,64%	696.434.580	631.564.765
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab./Kota	132.544.875	101.044.720	97.206.416	116.502.220	132.239.436	88.570.450	90.117.220	107.831.445	99,77%	87,65%	92,71%	92,56%	447.298.231	418.758.551
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	83.408.537	53.426.420	46.327.916	59.320.420	83.153.098	41.693.150	42.838.920	55.954.245	99,69%	78,04%	92,47%	94,33%	242.483.293	223.639.413
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	49.136.338	47.618.300	50.878.500	57.181.800	49.086.338	46.877.300	47.278.300	51.877.200	99,90%	98,44%	92,92%	90,72%	204.814.938	195.119.138
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab./Kota	243.993.292	156.935.756	261.851.772	285.159.702	242.711.408	148.830.422	247.680.274	264.694.932	99,47%	94,84%	94,59%	92,82%	947.940.522	903.9117.036
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab./Kota	204.359.682	115.806.092	223.997.408	218.417.102	203.274.139	114.312.938	213.204.194	209.392.206	99,47%	98,71%	95,18%	95,87%	762.580.284	740.183.477
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab./Kota	39.633.610	41.129.664	37.854.364	66.742.600	39.437.269	34.517.484	34.476.080	55.302.726	99,50%	83,92%	91,08%	82,86%	185.360.238	163.733.559
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	236.589.746	327.830.180	264.621.032	339.083.672	230.743.660	242.761.120	234.825.698	301.174.423	97,53%	74,05%	88,74%	88,82%	1.168.124.630	1.009.504.901
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan	134.584.205	157.383.239	129.879.969	148.075.000	132.167.334	150.867.500	120.754.468	132.483.473	98,20%	95,86%	92,97%	89,47%	569.922.413	536.272.775

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab./Kota														
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab./Kota	134.584.205	157.383.239	129.879.969	148.075.000	132.167.334	150.867.500	120.754.468	132.483.473	98,20%	95,86%	92,97%	89,47%	569.922.413	536.272.775
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab./Kota	61.954.110	135.911.846	86.905.811	126.008.672	61.903.914	60.441.840	68.101.030	107.403.400	99,92%	44,47%	78,36%	85,23%	410.780.439	297.850.184
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.954.110	23.155.300	12.383.093	20.851.047	61.903.914	23.155.300	12.374.300	19.543.400	99,92%	100%	99,93%	93,73%	118.343.550	116.976.914
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	112.756.546	74.522.718	105.157.625		37.286.540	56.726.730	87.860.000		33,07%	74,78%	83,55%	292.436.889	181.873.270
2.08.03.2.03	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab./Kota	40.051.431	34.535.095	47.835.252	65.000.000	36.672.412	31.451.780	45.970.200	61.287.550	91,58%	91,07%	96,10%	94,29%	187.421.778	175.381.942
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab./Kota	40.051.431	34.535.095	28.850.595	65.000.000	36.672.412	31.451.780	27.905.900	61.287.550	91,56%	91,07%	96,73%	94,29%	168.437.121	157.317.642
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	18.984.657	-	-		18.064.300	-			95,15%	-	18.984.657	18.064.300
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	278.634.404	241.451.524	252.061.475	402.823.421	275.324.784	239.390.282	235.347.434	343.795.730	98,81%	99,15%	93,37%	85,35%	1.174.970.824	1.093.858.230
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab./Kota	176.684.904	162.568.724	182.005.312	184.365.397	173.375.284	160.507.482	176.773.558	179.941.620	98,13%	98,33%	97,13%	97,60%	705.624.337	690.597.944
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab./Kota	130.197.508	105.097.424	125.189.668	129.849.768	130.097.008	104.392.854	122.032.098	127.356.920	99,92%	99,33%	97,48%	98,08%	490.334.368	483.878.880
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab./Kota	46.487.396	57.471.300	56.815.644	54.515.629	43.278.276	56.114.628	54.741.460	52.584.700	93,10%	97,64%	96,35%	96,46%	215.289.969	206.719.064
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan	101.949.500	78.882.800	70.056.163	218.458.024	101.949.500	78.882.800	58.573.876	163.854.110	100%	100%	83,61%	75,00%	469.346.487	403.260.286

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab./Kota														
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab./Kota	101.949.500	78.882.800	70.056.163	218.458.024	101.949.500	78.882.800	58.573.876	163.854.110	100%	100%	83,61%	75,00%	469.346.487	403.260.286
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	32.473.829	74.956.788	145.131.871	180.686.000	32.450.829	71.745.188	101.029.323	166.810.843	99.93%	95.72%	69.61%	92,32%	433.248.488	372.036.183
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab./Kota	32.473.829	74.956.788	145.131.871	180.686.000	32.450.829	71745.188	101.029.323	166.810.843	99.93%	95.72%	69.61%	92,32%	433.248.488	372.036.183
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab./Kota	32.473.829	74.956.788	145.132.871	180.686.000	32.450.829	72.745.168	101.029.323	166.810.843	99.93%	95.72%	69.61%	92,32%	433.248.488	371.038.183
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	125.633.143	259.561.589	510.972.634	904.906.747	124.072.695	236.582.240	461.757.862	834.007.640	98,76%	91,15%	90,37%	92,17%	1.801.074.113	1.656.420.437
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	18.009.980	63.896.308	80.818.698	488.926.747	17.934.460	58.536.395	68.759.156	451.799.340	99,58%	91,61%	85,05%	92,41%	651.651.733	597.029.351
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenagan Kabupaten/Kota	18.009.980	63.896.308	80.818.698	488.926.747	17.934.460	58.536.395	68.759.156	451.799.340	99,58%	91,61%	85,05%	92,41%	651.651.733	597.029.351
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	107.623.163	195.665.281	430.153.936	415.980.000	106.138.235	178.045.845	392.998.704	382.208.300	98,62%	91,00%	91,36%	91,88%	1.149.422.380	1.059.391.084
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi PHA bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.332.807	120.039.783	349.882.445	240.980.000	31.157.117	115.654.845	317.036.500	222.346.400	96,36%	96,35%	90,61%	92,27%	743.235.035	686.194.862
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	75.290.356	75.625.498	80.271.491	175.000.000	74.981.118	62.391.000	75.962.204	159.861.900	99,59%	82,50%	94,63%	91,35%	406.187.345	373.196.222
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	120.039.159	485.733.664	357.774.326	521.421.327	117.270.792	359.268.112	285.001.469	441.514.718	97,69%	73,96%	79,66%	84,68%	1.484.968.476	1.203.055.091

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29.111.719	108.519.104	79.971.240	210.673.000	26.343.637	102.892.300	73.755.900	191.151.800	90,49%	94,81%	92,33%	90,73%	428.275.063	394.143.637
2.08.07.2.01.001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab./Kota	29.111.719	30.169.104	21.566.720	-	26.343.637	27.230.000	20.571.100	-	90,49%	90,26%	95,38%	-	80.847.543	74.144.737
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	-	-	-	210.673.000	-	-	-	191.151.800	-	-	-	90,73%	210.673.000	191.151.800
2.08.07.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	78.350.000	58.404.520	-	-	75.662.300	53.184.800	-	-	96,57%	91,06%	-	136.754.520	128.847.100
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tk Daerah Kab./Kota	90.927.440	274.908.560	222.191.743	222.348.327	90.927.155	158.567.532	161.155.309	168.924.618	99,99%	57,68%	72,63%	75,97%	810.376.070	579.574.614
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.927.440	38.621.106	42.210.461	25.905.952	90.927.155	36.908.000	40.283.969	24.575.322	99,99%	95,56%	95,44%	94,86%	197.664.959	192.694.446
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	-	-	-	196.442.375	-	-	-	144.349.296	-	-	-	73,48%	196.442.375	144.349.296
2.08.07.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	236.287.454	179.981.282	-	-	121.659.532	120.871.340	-	-	51,49%	67,16%	-	416.268.736	242.530.872
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	102.306.000	55.611.343	88.400.000	-	97.808.280	50.090.260	81.438.300	-	95,60%	90,07%	92,12%	246.317.343	229.336.840
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	-	102.306.000	55.611.343	88.400.000	-	97.808.280	50.090.260	81.438..300	-	95,60%	90,07%	92,12%	246.317.343	147.898.540
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	123.529.351	181.317.148	195.846.472	428.031.380	119.297.237	163.385.895	176.803.579	385.991.252	96,57%	90,11%	90,28%	90,18%	928.724.351	845.477.963
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi	9.905.554	41.878.660	60.024.272	105.096.352	9.895.554	31.490.660	53.505.272	102.145.500	99,90%	75,02%	89,14%	97,19%	216.904.838	197.036.986

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-	6.624.000	-	-	-	3.920.000	-	-	-	59,18%	-		6.624.000	3.920.000
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	-	7.054.560	7.054.272	10.554.560	-	7.014.560	7.054.272	10.554.200	-	99,43%	100%	100%	24.663.392	24.623.032
2.14.02.2.01.0015	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	9.905.554	28.200.100	52.970.000	-	9.895.554	20.556.100	46.451.000	-	99,90%	72,89%	87,69%	-	91.075.654	76.902.654
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	-	-	-	94.541.792	-	-	-	91.591.300	-	-	-	96,88%	94.541.792	91.591.300
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	113.623.797	139.438.488	135.822.200	322.935.028	109.401.683	131.895.235	123.298.307	283.845.752	96,57%	94,59%	90,78%	87,90%	711.819.513	648.440.977
2.14.02.2.02.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	39.814.248	24.052.688	12.574.200	32.090.048	39.748.728	20.310.620	11.910.000	26.033.325	99,84%	84,44%	94,72%	81,13%	108.531.184	98.002.673
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	-	4.729.800	-		-	4.256.820	-			90,00%	-		4.729.800	4.256.820
2.14.02.2.01.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	-	100.280.000	-	-	-	100.240.000	-	-	-	99,96%	100.280.000	100.240.000
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	6.327.267	-	-	-	3.584.267	-	-	-	56,65%	-	-	-	6.327.267	3.584.267
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	67.482.282	105.576.000	117.768.000	183.900.000	66.068.688	102.247.795	105.908.307	150.952.427	97,91%	96,85%	89,93%	82,08%	474.726.282	425.177.217
2.14.02.2.02.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	-	5.080.000	5.480.000	-	-	5.080.000	5.480.000	-	-	100%	100%	-	10.560.000	10.560.000
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	-	-	-	6.664.980	-	-	-	6.620.000	-	-	-	99,33%	6.664.980	6.620.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.601.019.787	3.598.161.475	5.953.872.250	5.932.703.522	3.802.985.774	3.043.227.567	4.972.171.330	5.065.298.601	82,66%	84,58%	83,51%	85,38%	20.085.757.034	16.883.683.272
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai	599.680.595	722.681.599	1.057.228.980	1.571.255.522	517.928.880	560.838.956	868.143.600	1.190.159.873	86,37%	77,61%	82,12%	75,75%	3.950.846.696	3.137.071.309

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kearifan Budaya Lokal														
2.14.03.2.01.0001	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	-	4.380.000	120.000.000	-	-	4.380.000	57.600.000	-	-	100%	48,00%	-	124.380.000	61.980.000
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	-	380.759.522	-	-	-	267.063.376	-	-	-	70,14%	380.759.522	267.063.376
2.14.03.2.01.0001	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	25.037.264	21.819.000	-	-	22.283.165	21.721.900	-	-	89,00%	99,55%	-	46.856.264	44.005.065
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	60.000.000	-	-	-	53.344.500	-	-	-	88,91%	60.000.000	53.344.500
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	99.456.361	35.676.000	374.496.000	-	95.496.940	27.275.800	253.612.671	-	96,02%	76,45%	67,72%	509.628.361	376.385.411
2.14.03.2.01.0006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	187.200.000	156.000.000	-	-	140.400.000	125.100.000	-	-	75,00%	80,19%	-	343.200.000	265.500.000
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	-	180.000.000	-	-	-	144.000.000	-	-	-	80,00%	180.000.000	144.000.000
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	-	38.790.914	80.000.000	80.000.000	-	16.775.000	71.800.000	63.487.500	-	43,24%	89,75%	79,36%	198.790.914	152.062.500
2.14.03.2.01.0005	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	130.350.037	118.397.060	160.413.980	-	74.780.000	106.559.542	136.043.500	-	57,37%	90,00%	84,815	-	409.161.077	317.383.042
2.14.03.2.01.0003	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	174.412.558	-	-	-	170.369.350	-	-	-	97,68%	-	-	-	174.412.558	170.369.350
2.14.03.2.01.0007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	294.918.000	249.420.000	483.320.000	-	272.779.530	174.944.309	428.602.400	-	92,49%	70,14%	88,68%	-	1.027.658.000	876.326.239
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	-	-	-	496.000.000	-	-	-	408.651.826	-	-	-	82,39%	496.000.000	408.651.826
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.309.890.854	1.190.565.000	1.150.640.000	1.471.450.000	1.303.022.551	1.188.644.900	1.143.210.000	1.268.113.418	99,48%	99,84%	99,35%	86,18%	5.122.545.854	4.902.990.869

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.03.2.02.003	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	11.817.275	-	-	-	11.240.000	-	-	-	95,11%	-	-	-	11.817.275	11.240.000
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.298.073.579	1.190.565.000	1.150.640.000	1.471.450.000	1.291.782.551	1.188.644.900	1.143.210.000	1.268.113.418	99,52%	99,84%	99,35%	86,18%	5.110.728.579	4.891.750.869
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab./Kota	2.069.662.864	1.251.014.876	2.491.594.995	2.588.908.000	1.416.494.343	1.070.363.711	2.004.577.568	2.311.314.130	68,44%	85,56%	80,45%	89,28%	8.401.180.735	6.802.749.752
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47.312.001	9.000.000	46.800.000	18.900.000	14.970.000	7.050.000	6.975.000	2.820.000	31,64%	78,33%	14,90%	14,92%	122.012.001	31.815.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	739.698.463	163.075.000	234.890.000	615.103.000	296.483.400	162.370.000	219.705.000	490.970.000	40,08%	99,57%	93,54%	79,42%	1.752.766.463	1.169.528.400
2.14.03..2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.282.652.400	1.069.944.876	2.197.004.995	1.936.455.000	1.105.040.943	892.158.711	1.768.597.568	1.809.321.130	86,15%	83,38%	80,50%	93,43%	6.486.057.271	5.575.118.352
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	8.995.000	12.900.000	18.450.000	-	8.785.000	9.300.000	8.203.000	-	97,67%	72,09%	44,46%	40.345.000	26.288.000
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab./Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	621.785.474	433.900.000	1.254.408.275	301.090.000	565.540.000	223.380.000	956.240.162	295.711.180	90,96%	51,48%	76,23%	98,21%	2.611.183.749	2.040.871.342
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	10.769.104	15.140.000	19.448.275	6.700.000	3.940.000	14.130.000	6.658.000	1.800.000	36,59%	93,33%	34,23%	26,87%	52.057.379	26.528.000
2.14.03.2.04.0003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	611.016.370	418.760.000	1.234.960.000	-	561.600.000	209.250.000	949.582.162	-	91,91%	49,97%	76,89%	-	2.264.736.370	1.720.432.162
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	-	-	3.750.000	-	-	-	3.738.600	-	-	-	99,70%	3.750.000	3.738.600
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan	-	-	-	290.640.000	-	-	-	290.172.580	-	-	-	99,84%	290.640.000	290.172.580

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	880.720.247	1.471.309.020	1.643.144.250	1.745.365.000	822.027.300	1.040.027.300	1.449.950.125	1.641.168.620	93,34%	70,69%	88,24%	94,03%	5.740.538.517	4.953.173.345
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga	840.565.613	1.430.210.000	1.630.911.825	494.200.000	809.157.300	1.006.900.000	1.440.121.825	422.053.800	96,26%	70,40%	88,30%	85,40%	4.395.887.438	3.678.232.925
2.14.04.2.01.0002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	194.980.000	165.000.000	360.000.000	-	191.100.000	163.500.000	232.840.000	-	98,01%	99,09%	64,68%	-	719.980.000	587.440.000
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	-	-	300.0000.000	-	-	-	297.920.000	-	-	-	99,31%	3.000.000.000	297.920.000
2.14.04.2.01.0005	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	609.886.500	1.257.340.000	1.223.560.000	-	609.477.300	836.350.000	1.175.220.000	-	99,93%	66,52%	96,05%	-	3.090.786.500	2.621.047.300
2.14.04.2.01.0007	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	35.699.113	7.870.000	47.351.825	-	8.580.000	7.050.000	32.061.825	-	24,03%	89,58%	67,71%	-	90.920.938	47.691.825
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	-	-	-	107.800.000	-	-	-	57.554.800	-	-	-	53,39%	107.800.000	57.554.800
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	-	-	86.400.000	-	-	-	66.579.000	-	-	-	77,06%	86.400.000	66.579.000

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.04.2.01.0018	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab./Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	40.154.634	41.099.020	12.232.425	1.251.165.000	12.870.000	33.127.300	9.828.300	1.219.114.820	32,05%	80,60%	80,35%	97,44%	1.344.651.079	1.274.940.420
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	40.154.634	41.099.020	12.232.425	41.565.000	12.870.000	33.127.300	9.828.300	9.514.820	32,05%	80,60%	80,35%	97,44%	135.051.079	65.340.420
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	-	-	576.000.000	-	-	-	576.000.000	-	-	-	100%	576.000.000	576.000.000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	-	-	633.600.000	-	-	-	633.600.000	-	-	-	100%	633.600.000	633.600.000
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	4.279.379.323	4.418.952.932	6.572.167.977	7.737.902.223	3.752.866.692	3.922.386.642	5.460.983.963	6.487.745.221	87,70%	88,76%	83,09%	83,84%	23.008.402.455	19.623.982.518
2.08.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	1.150.000	5.329.740	10.580.433	10.580.433	1.150.000	4.385.000	10.324.600	10.488.100	100%	82,27%	97,56%	99,13%	27.640.606	26.347.700
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.150.000	-	-	-	1.150.000	-	-	-	100%	-	-	-	1.150.000	1.150.000
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	5.329.740	10.580.433	10.580.433	-	4.385.000	10.324.600	10.488.100	-	82,27%	97,56%	99,13%	26.490.606	25.197.700
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.326.000.000	3.121.042.000	5.035.623.743	5.708.229.000	2.971.571.489	2.757.825.612	4.104.220.135	4.844.656.429	89,34%	88,36%	81,50%	84,87	17.190.894.743	14.678.273.665
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.326.000.000	3.121.042.000	5.035.623.743	5.708.229.000	2.971.571.489	2.757.825.612	4.104.220.135	4.844.656.429	89,34%	88,36%	81,50%	84,87	17.190.894.743	14.678.273.665
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	13.320.000	-	-	-	10.540.541	-	-	-	79,13%	13.320.000	10.540.541
2.08.012.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	13.320.000	-	-	-	10.540.541	-	-	-	79,13%	13.320.000	10.540.541
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	407.131.394	428.129.499	-	-	309.633.386	365.096.642	-	-	76,05%	85,28%	-	-	835.260.893	674.730.028
2.08.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.000.000	-	-	-	1.550.000	-	-	-	38,75%	-	-	-	4.000.000	1.550.000
2.08.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	26.126.860	22.800.000	-	-	26.126.860	22.800.000	-	-	100%	100%	-	-	48.926.860	48.926.860
2.08.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Mlik Daerah SKPD	33.995.571	33.994.427	-	-	33.935.736	32.957.000	-	-	99,82%	96,95%	-	-	67.989.998	66.892.736

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	343.008.963	371.335.072	-	-	248.020.790	309.339.642	-	-	72,31%	83,30%	-	-	714.344.035	557.360.432
2.08.01.2.06	Aministrasi Umum Perangkat Daerah	146.083.620	269.673.583	367.976.499	504.993.539	109.853.915	216.300.257	309.406.236	436.048.010	75,20%	80,21%	84,08%	86,35%	1.288.727.241	1.071.608.418
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.581.889	37.580.620	94.957.339	71.698.841	37.453.502	36.859.800	91.969.100	70.330.427	99,66%	98,08%	96,85%	98,09%	241.818.689	236.612.829
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.377.031	24.595.963	17.051.160	19.624.228	16.477.913	19.093.300	12.981.000	16.224.700	47,93%	77,63%	76,13%	82,68%	95.648.382	64.776.913
2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	1.999.200	-	-	-	770.000	-	-	-	38,52%	-	-	-	1.999.200	770.000
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.125.500	207.497.000	255.968.000	413.670.470	55.152.500	160.347.157	204.456.136	349.492.883	76,47%	77,25%	79,88%	84,49%	949.260.970	769.448.676
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	103.260.597	295.590.181	-	-	85.220.923	269.434.772	-	-	82,53%		398.850.778	354.655.695
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	50.377.857	50.496.362	-	-	35.400.000	45.274.772	-	-	70,27%		100.874.219	80.674.772
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	52.882.740	245.093.819	-	-	49.820.923	224.160.000	-	-	94,21%		297.976.559	273.980.923
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.041.245	516.734.621	623.545.000	789.535.769	267.719.991	508.718.631	596.880.719	627.486.530	93,92%	98,45%	95,72%	79,48%	2.214.856.635	2.000.805.871
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.875.248	89.300.000	75.020.000	139.900.000	78.089.879	82.607.305	73.013.719	116.136.530	89,89%	92,51%	97,33%	83,01%	391.095.248	349.847.433
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.342.277	122.257.121	-	-	33.324.092	121.093.828	-	-	94,29%	99,05%	-	-	157.599.398	154.417.920
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.823.720	305.177.500	548.525.000	649.635.769	156.306.220	305.017.500	523.867.000	511.350.000	96,00%	99,95%	95,50%	78,71%	1.666.161.989	1.496.540.720
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.973.064	78.043.489	431.181.705	415.653.301	92.937.911	70.060.500	354.931.350	289.090.839	81,54%	89,77%	64,71%	69,55%	1.038.851.559	807.020.600
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	296.607.050	376.890.000	-	-	226.881.350	261.211.839	-	-	76,49%	69,31%	673.497.050	488.093.189
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.977.306	22.159.106	23.409.110	29.414.806	19.994.091	14.565.000	23.407.000	19.279.000	58,85%	65,73%	99,99%	65,54%	108.960.328	77.245.091
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.995.758	55.884.383	111.165.545	9.348.495	72.943.820	55.495.500	104.643.000	8.600.000	91,18%	99,30%	94,13%	91,99%	256.394.181	241.682.320
JUMLAH		**11.173.049.117**	**11.389.874.784**	**16.476.576.528**	**18.877.981.792**	**9.766.976.528**	**9.619.034.326**	**13.901.181.033**	**16.308.240.405**	**87,42%**	**84,45%**	**84,37%**	**86,38%**	**57.917.482.221**	**49.595.432.292**

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Adapun yang menjadi kelompok sasaran layanan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Lembaga organisasi perempuan di Kabupaten Tabalong;
2. Kelompok perempuan rentan di Kabupaten Tabalong;
3. Masyarakat Perempuan dan Anak dengan Kategori 0-19 tahun;
4. Lembaga Organisasi Anak di Kabupaten Tabalong;
5. Kelompok Generasi Berencana di Kabupaten Tabalong.

2.1.5. Kerjasama Daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah

Untuk terus meningkatkan kinerja palayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong aktif menjalin berbagai Kerjasama lintas sektor dan antar lembaga untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga. Berikut beberapa Kerjasama yang telah dilaksanakan :

1. Kerjasama dengan Pengadilan Agama Tanjung

   Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bekerjasama dengan Pengadilan Agama sejak Tahun 2020 dalam memberikan layanan konseling kepada pemohon dispensasi kawin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial dari perkawinan usia anak. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dikecamatan dengan sasaran pelajar.

2. Kolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Tabalong

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong menggelar Sosialisasi Masjid Ramah Anak dan Konveksi Hak Anak bagi Pengurus dan Pengelola Masjid se-Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak, serta mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sosialisasi ini melibatkan Kementerian Agama Kabupaten Tabalong sebagai mitra strategis.

Perjanjian Kerjasama juga dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan Kementerian Agama Kabupaten Tabalong yaitu Pelaksanaan Layanan Penjangkauan Melalui Konseling Psikologis Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak, Tanjung dan Tanta di Kabupaten Tabalong pada Tahun 2022 berlaku sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan 18 Februari 2025 dengan Nomor kerjasama Pihak 1: 197/KK.17.09-/HM.01/02/2022 dan Pihak 2: B-129 /DP3AP2KB/SET/800/02/2022.

3. Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonsesia (APSAI)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong membentuk APSAI

sebagai wadah bagi Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tabalong untuk berperan dalam Pemenuhan Hak Anak.

4. Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong melakukan penguatan Gugus Tugas KLA tingkat desa dan kelurahan dengan melibatkan seluruh kepala desa dan lurah se- Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kemitraan antara pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2.2. Permasalahan Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Pembangunan pemberdayaan perempuan sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu penyetaraan gender merupakan bentuk kebijakan yang berupaya untuk diterapkan. Penyetaraan gender merupakan suatu wacana dan gerakan mencapai kesetaraan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan, yang hingga saat ini masih menjadi fenomena gunung es, respons dan pendapat bermunculan, mulai dari mendukung, menolak, menerima sebagai wacana teoritis tapi tidak bisa dilaksanakan secara empiris. Kondisi mendukung dan menolak bukan hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga perempuan. Walaupun permasalahan gender biasanya identik dengan ketidakadilan bagi perempuan dan anak, tetapi secara mengejutkan justru para perempuan dan anak banyak

menerima kondisi ketidakadilan itu sebagai suatu kondisi yang seharusnya diterima (*taken for granted*). Masalah ketidakadilan itu berujung pada bentuk kekerasan, pelecahan dan tindakan tidak manusiawi seperti penganiayaan dan lain sebagainya.

Perkembangan angka Indeks Pembangunan Gender yang terus meningkat disebabkan dengan adanya ketersedian layanan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri atas berbagai bentuk lembaga.

Permasalahan yang terjadi pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu :

1. belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender, yang disebabkan oleh masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai akibat dari belum optimalnya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, manajemen dan negosiasi, belum optimalnya peran dan keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif, belum optimalnya partisipasi politik perempuan, serta belum optimalnya akses perempuan terhadap peluang karir dan pendidikan dan masih terjadinya kekerasan pada perempuan, baik fisik, seksual, maupun emosional karena belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif.
2. belum optimalnya pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari perlindungan hak anak dan kesetaraan gender, yang disebabkan oleh belum optimalnya sistem perlindungan anak dalam mencegah pernikahan usia dini sebagai akibat dari belum optimalnya layanan perlindungan anak yang responsif dan mudah diakses, kurangnya

edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan anak, keterbatasan akses pendidikan bagi anak perempuan, belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga dan budaya yang masih mendukung pernikahan dini, serta belum optimalnya implementasi aturan terkait batas usia pernikahan.

Permasalahan yang terjadi pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu :

1. belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga, yang disebabkan oleh masih tingginya laju pertambahan penduduk sebagai akibat dari belum optimalnya akses, edukasi, dan pemberdayaan perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, masih adanya angka kehamilan yang tidak diinginkan serta masih adanya pernikahan usia dini.

Permasalahan pokok yang menjadi wewenang dan lingkup kerja DP3AP2KB Kabupaten Tabalong meliputi :

1. Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
2. Belum optimalnya pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari perlindungan hak anak dan kesetaraan gender;
3. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender.

2.2.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2042 merupakan dasar dalam penyusunan dan evaluasi RTRW untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Keterkaitan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dengan penyusunan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) memiliki peran untuk mengidentifikasi potensi dampak dan risiko lingkungan dari rencana tata ruang terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak serta terhadap dinamika kependudukan dan keluarga berencana.

Lingkungan hidup yang sehat sangat mempengaruhi kualitas hidup yang tinggal di dalamnya. Sebaliknya lingkungan hidup yang tidak sehat juga turut menyumbangkan kualitas yang buruk bagi SDM yang ada di lingkungan tersebut. Dalam urusan perempuan dan anak, lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan perempuan dan anak sebagai pemanfaat yangb ijak atau bahkan sebagai pengrusak lingkungan hidup.Sebagai contohnya perempuan sebagai ibu rumah tangga, bila pengetahuan dan kesadarannya terhadap kesehatan buruk maka dampaknya akan buruk juga terhadap satu keluarga yang tinggal di rumah tersebut.

Pertumbuhan anak yang sehat sangat dipengaruhi oleh pemenuhan hak anak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Lingkungan sehat bagi anak seharusnya diberikan mulai dari keluarga hingga masyarakat yang ada disekitar anak tersebut. Sanitasi dan ketersediaan sumber air yang sehat akan berpengaruh kepada kualitas hidup anak. Begitu juga dengan udara yang sehat, yang bebas polusi merupakan salah satu bentuk usaha dalam hal memenuhi hak anak di bidang kesehatan.

Ketersediaan sanitasi yang baik, udara yang bebas asap rokok dan bebas polusi kendaraan merupakan tuntutan kinerja dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memberikan layanan khususnya di bidang kesehatan kepada perempuan dan anak. Melalui koordinasi dan kolaborasi dengan dinas terkait dalam upay

memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang menyasar kepada perempuan dan anak.

Tabel 2.8

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tabalong

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga;	masih tingginya laju pertambahan penduduk sebagai akibat dari belum optimalnya akses, edukasi dan pemberdayaan perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kontrasepsi;	Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan reproduksi dan metode kontrasepsi yang berkualitas terutama daerah pedesaan atau terpencil, menghambat perempuan dalam merencanakan keluarga.
			Belum optimalnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, metode kontrasepsi, dan manfaat keluarga berencana menyebabkan perempuan dan pasangan tidak memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan tentang ukuran keluarga.
			Perempuan yang tidak memiliki kekuatan tawar dan kemampuan untuk membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi mereka sendiri akan kesulitan untuk mengontrol kehamilan dan pilihan kontrasepsi.
			Pendidikan seksual sering dianggap tabu, sehingga informasi penting tidak sampai ke remaja atau perempuan usia subur.
			Hubungan seks yang tidak aman tanpa perlindungan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual, yang juga berkontribusi pada masalah kesehatan reproduksi.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		masih adanya angka kehamilan yang tidak diinginkan;	Belum optimalnya layanan fasilitas kesehatan yang aman, ramah dan tidak menghakimi
			Belum optimalnya layanan kontrasepsi modern terutama di daerah terpencil
			Banyak perempuan tidak memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan terkait hubungan seksual dan penggunaan kontrasepsi
		masih adanya pernikahan usia dini	Belum optimalnya edukasi pencegahan perkawinan anak dan kesehatan reproduksi
			Anak-anak, terutama perempuan, yang tidak menyelesaikan pendidikan cenderung lebih rentan dinikahkan dini
			Kurangnya pemahaman akan risiko pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan maupun sosial.
			Pernikahan muda dianggap wajar atau bahkan diharapkan
			Adanya tekanan sosial untuk menjaga ”Kehormatan” keluarga melalui pernikahan, terutama jika anak perempuan mulai beranjak dewasa.
			Belum optimalnya penegakan hukum dan celah regulasi, praktik dispensasi kawin (izin nikah di bawah umur melalui pengadilan) masih longgar dan sering disalahgunakan
			Anak-anak dan orang tua tidak memahami risiko medis, psikologis, dan hukum dari pernikahan dini
2.	Belum optimalnya pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari perlindungan hak anak dan kesetaraan gender;	belum optimalnya sistem perlindungan anak dalam mencegah pernikahan usia dini sebagai akibat dari belum optimalnya layanan perlindungan	Banyak kasus pernikahan usia dini tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara cepat
			Lemahnya sistem pelaporan dan tindak lanjut terhadap potensi kekerasan atau pelanggaran hak anak
			Kurangnya pelatihan aparat desa, guru, dan petugas sosial dalam mengenali dan menangani kasus

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		anak yang responsif dan mudah diakses;	Pemantauan terhadap praktik pernikahan dini masih bersifat reaktif, bukan preventif
			Masih banyak celah hukum, seperti penggunaan dispensasi kawin yang mudah diberikan pengadilan
			Minimnya kapasitas SDM pada UPTD PPA dan PUSPAGA
			Kurangnya Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini
		kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan anak, keterbatasan akses pendidikan bagi anak perempuan;	Masyarakat belum memahami sepenuhnya bahwa pernikahan anak berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak, masa depan pendidikan dan ekonomi anak, khususnya perempuan, siklus kemiskinan lintas generasi.
			Minimnya informasi yang berbasis bukti dan tidak adanya kampanye publik yang masif dan berkelanjutan
			Menikahkan anak perempuan dianggap hal yang wajar atau bahkan solusi ”terbaik” untuk menghindari zina, menjaga kehormatan keluarga, mengurangi beban ekonomi.
			Banyak anak perempuan putus sekolah karena : jarak sekolah yang jauh atau tidak adanya sekolah lanjutan di daerahnya, ketidaknyamanan orang tua membiayai sekolah, norma sosial yang memprioritaskan anak laki-laki dalam pendidikan.
			Anak Perempuan yang tidak bersekolah lebih rentan menjadi target pernikahan dini
			Belum optimalnya program pendidikan masyarakat secara langsung di daerah rawan pernikahan anak
			Belum optimalnya dialog antara tokoh adat/agama dengan pendekatan hak anak dan kesehatan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga dan budaya yang masih mendukung pernikahan dini:	Kemiskinan menjadi salah satu pendorong utama pernikahan anak : anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi
			Pernikahan dini dianggap sebagai ”solusi untuk mengurangi beban tanggungan keluarga.
			Keluarga tidak memiliki alternatif penghasilan atau akses terhadap program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
			Minimnya keterlibatan keluarga miskin dalam program pelatihan keterampilan, kewirausahaan atau bantuan sosial yang bersifat produktif.
			Ada anggapan bahwa anak perempuan ”lebih aman” jika segera dinikahkan.
			Tekanan sosial terhadap anak perempuan yang mulai tumbuh dewasa (pubertas) untuk segera menikah.
			Pernikahan anak sebagai hal yang wajar atau bahkan ideal, terutama bagi perempuan.
			Belum optimalnya peran tokoh masyarakat/adat/agama dalam menolak praktik ini bahkan justru memperkuatnya.
		belum optimalnya implementasi aturan terkait batas usia pernikahan	Banyak masyarakat terutama di daerah, tidak mengetahui atau tidak memahami aturan baru mengenai batas usia pernikahan.
			Budaya atau adat sering lebih dipatuhi dibandingkan hukum negara.
			Kurangnya penyuluhan dari pemerintah daerah atau aparat desa terkait larangan pernikahan usia dini.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Meskipun ada atauran hukum, masyarakat masih menganggap menikahkan anak adalah urusan keluarga yang tidak perlu campur tangan negara.
			Aparat lokal, seperti kepala desa atau tokoh agama, kadang ikut membiarkan praktik tersebut karena dianggap ”tradisi”.
			Belum ada sistem terpadu antara Dinas P3AP2KB, KUA, Sekolah dan Lembaga Sosial untuk mencegah pernikahan dini.
			Sering terjadi kesenjangan data dan informasi antar lembaga sehingga sulit melakukan pencegahan secara efektif
3.	Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender.	masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai akibat dari belum optimalnya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, manajemen, dan negosiasi;	Banyak program pelatihan kepemimpinan dan manjemen yang tidak inklusif terhadap perempuan, terutama di tingkat akar rumput. Perempuan, terutama di pedesaan jarang mendapatkan pelatihan formal dalam pengambilan keputusan, manajemen proyek atau advokasi.
			Keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan (pemerintahan desa, BPD, organisasi masyarakat dll) masih rendah.
			Budaya patriarki sering menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan hanya sebagai pelaksana atau pendukung.
			Banyaknya program hanya bersifat jangka pendek, seremonial atau tidak tepat sasaran.
			Tidak ada pendampingan atau mentoring jangka panjang untuk mencetak pemimpin perempuan di tingkat lokal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Minimnya dukungan lingkungan atau keluarga terhadap partisipasi perempuan di luar rumah
			Tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak membuat perempuan kesulitan untuk aktif dalam kegiatan sosial atau pelatihan kepemimpinan.
		belum optimalnya peran dan keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif;	Minimnya dukungan dari masyarakat, media, dan elite politik terhadap keterlibatan perempuan di jabatan tinggi sehingga Perempuan sering dianggap ”tidak cocok atau ”tidak layak” memimpin.
			Kebijakan alternatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan sering tidak diterapkan secara maksimal atau hanya bersifat simbolis sehingga representasi perempuan tidak mencapai kualitas, hanya kuantitas.
			Akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan dan pendidikan politik masih terbatas sehingga mengurangi kesiapan dan kepercayaan diri perempuan untuk mengambil peran strategis.
		belum optimalnya partisipasi politik perempuan;	Partai politik belum secara serius mendorong keterlibatan perempuan dalam struktur partai atau pencalonan politik sehingga perempuan sulit mendapat posisi strategis dalam daftar calon legislatif maupun jabatan publik lainnya.
			Masih banyak perempuan yang belum mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau akses pada informasi politik yang memadai sehingga perempuan kurang percaya diri untuk maju di dunia politik dan tidak memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki akibat terbatasnya akses pembinaan.
			Minimnya figur perempuan yang sukses di dunia politik mengurangi inspirasi dan motivasi bagi perempuan lain untuk terlibat sehingga politik tetap dipersepsikan sebagai ”dunia lak-laki”.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		belum optimalnya akses perempuan terhadap peluang karir dan pendidikan	Sedikitnya perempuan dalam posisi pengambil keputusan menyebabkan kebijakan kurang berpihak pada kebutuhan perempuan sehingga tidak ada regulasi kuat yang mendorong kesetaraan akses terhadap pendidikan dan karier.
			Perempuan harus mengurus rumah tangga sambil bekerja atau belajar sehingga waktu dan energi untuk mengembangkan diri menjadi sangat terbatas.
			Banyak tempat kerja tidak menyediakan fasilitas ramah gender seperti cuti melahirkan yang adil, daycare atau jam kerja fleksibel sehingga perempuan kesulitan menyeimbangkan antara peran domestik dan profesional.
			Di daerah terpencil atau miskin, anak perempuan sering dikorbankan untuk tidak sekolah atau putus sekolah lebih awal dibanding anak laki-laki sehingga peluang karier perempuan menjadi lebih terbatas karena rendahnya kualifikasi pendidikan.
			Masyarakat masih memegang pandangan bahwa peran utama perempuan adalah di ranah domestik (rumah tangga) sehingga pendidikan dan karier dianggap tidak terlalu penting bagi perempuan, sehingga tidak diprioritaskan.
		Masih terjadinya kekerasan pada perempuan, baik fisik, seksual maupun emosional karena belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan	Fasilitas seperti rumah aman, konseling, bantuan hukum dan pemulihan psikologis masih terbatas, terutama di daerah sehingga korban tidak mendapat perlindungan atau pemulihan yang layak dan sering kembali ke lingkungan berisiko.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		terhadap perempuan secara komprehensif	Pendidikan tentang kekerasan berbasis gender masih minim, baik di sekolah maupun di masyarakat.
			Minimnya Kapasitas SDM pada UPTD PPA
			Keterbatasan sarana dan prasarana terkait penjangkauan terhadap korban kekerasan
			Kurangnya kesadaran masyarakat agar melaporkan ke UPTD PPA
			Belum optimalnya Sosialisasi adanya UPTD PPA di Kabupaten Tabalong
			Masih adanya masyarakat yang belum paham terkait perlindungan Perempuan dan Anak sehingga jika mengalami kekerasan masih ada yang belum berani melaporkan.
			Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui adanya tugas dan fungsi UPTD Perlindungan Anak.

2.3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan pada analisis masalah pokok dan identifikasi permasalahan, isu-isu strategis yang menjadi wewenang DP3AP2KB Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak yang masih belum optimal;
2. Peningkatan Kualitas Keluarga yang berlum optimal.

Tabel 2.9

Penyusunan Isu Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KABUPATEN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Peran Strategis Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong terkait Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing untuk mendukung Kemajuan Daerah melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas	masih tingginya laju pertambahan penduduk sebagai akibat dari belum optimalnya akses, edukasi dan pemberdayaan perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kontrasepsi	Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan urbanisasi dunia. Penduduk perkotaan mencapai 65 persen	Transformasi Sosial : Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.	1. Sosial : Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya dan percepatan eliminasi malaria khususnya di kab/kota dengan kasus tertinggi.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
	masih adanya angka kehamilan yang tidak diinginkan						
	masih adanya pernikahan usia dini						
	belum optimalnya sistem perlindungan anak dalam mencegah pernikahan usia dini sebagai akibat dari belum optimalnya layanan perlindungan anak yang responsif dan mudah diakses	Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan urbanisasi dunia. Penduduk perkotaan mencapai 65 persen	Transformasi Sosial : Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia	1. Sosial : Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya dan percepatan eliminasi malaria khususnya di	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KABUPATEN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
perempuan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan.	kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan anak, keterbatasan akses pendidikan bagi anak perempuan belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga dan budaya yang masih mendukung pernikahan dini: belum optimalnya implementasi aturan terkait batas usia pernikahan			produktif.	kab/kota dengan kasus tertinggi. 2. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia : Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas. 3. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi, Pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KABUPATEN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai akibat dari belum optimalnya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, manajemen, dan negosiasi; belum optimalnya peran dan keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif; belum optimalnya partisipasi politik perempuan; belum optimalnya akses perempuan terhadap peluang karir dan pendidikan Masih terjadinya kekerasan pada perempuan, baik fisik, seksual maupun emosional karena belum optimalnya upaya pencegahan	1. Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM), 2. Ekonomi Tidak merata dan Kurang Inovasi 3. Kota Tidak Berkelanjutan	1. Peningkatan urbanisasi dunia. Penduduk perkotaan mencapai 65 persen. 2. Geopolitik dan Geoekonomi. Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71%.	1. Transformasi Sosial : Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. 2. Transformasi Ekonomi : Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. 3. Transformasi Tata Kelola : Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan	1. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia : Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas. 2. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi, Pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera; 2. Pengembangan Ekonomi yang tidak Inklusif dan Berorientasi Kerakyatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KABUPATEN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	dan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif			masyarakat sipil.			

2.4. Kinerja berdasarkan Indikator SDGs

TPB/ SDGs merupakan agenda pembangunan global yang menjadi panduan bagi semua negara, termasuk Indonesia, untuk membangun masa depan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan demi generasi saat ini dan yang akan datang. TPB/ SDgs pada dasarnya untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak, melindungi lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim, serta mewujudkan perdamaian, keadilan dan kemitraan global.

DP3AP2KB Kabupaten Tabalong mendukung capaian TPB/ SDGs melalui program, kegiatan dan sub kegiatan terkait lingkupan tugas dan fungsi. Tabel matrik TPB/SDGs yang relevan dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong dapat dilihat ditabel di bawah ini :

Tabel 2.10

Matrik TPB.SDGs Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

No Indikator	Indikator SDGs	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	**KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA**			
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi

No Indikator	Indikator SDGs	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		Daerah Kabupaten/Kota	Jangka Panjang (MKJP)
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
5	**KESETARAAN GENDER**			
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.			
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
16	**PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH**			
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.			

No Indikator	Indikator SDGs	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
16.1.1(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.			
16.2.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG

Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Periode 2025-2029, Pernyataan visi ini juga selaras dan dalam rangka melaksanakan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabalong sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Tabalong yaitu ”TABALONG TERDEPAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”. Visi RPJPD memiliki makna suatu keadaan yang ingin dicapai Kabupaten Tabalong untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang semakin baik, maju, dan berdaya saing tinggi. Kemajuan yang dicapai membawa Kabupaten Tabalong menjadi daerah yang berdaya ungkit tinggi bagi keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan terutama dikaitkan dengan posisi sebagai gerbang logistik di Pulau Kalimantan dan daerah yang berdampingan dengan IKN. Prioritas pembangunan daerah merupakan serangkaian janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah merupakan perwujudan agenda prioritas yang akan dilaksanakan selama masa berlaku RPJMD. Selanjutnya program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera;
2. Mendorong Kemajuan Daerah;
3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius;
4. Menjadi Daerah yang terdepan;

3.1 Tujuan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tabalong yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), salah satu sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah ”**Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan**”. Sasaran ini merupakan fondasi untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inklusif dalam pembangunan daerah. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut indikator sasarannya yaitu ”**Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**”, yang mencerminkan sejauh mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses dan manfaat pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong menetapkan tujuan untuk tahun 2025-2029, yaitu :

”**Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga”.**

Tujuan ini selaras dan mendukung pencapaian sasaran RPJMD, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas SDM dari perspektif gender, perlindungan hak anak, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, DP3AP2KB menggunakan tiga indikator tujuan, yaitu :

1. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

   Menggambarkan kemajuan pembangunan yang setara antara laki-laki dan perempuan, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Peningkatan IPG secara langsung berkontribusi pada penurunan ketimpangan gender (IKG).

2. **Indeks Perlindungan Anak (IPA)**

   Menilai sejauh mana anak-anak di Kabupaten Tabalong mendapatkan perlindungan, pengasuhan yang layak, dan terpenuhi

hak-haknya, sehingga menciptkan generasi muda yang sehat dan bebas dari kekerasan maupun eksploitasi.

3. **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**

   Mengukur kualitas keluarga berdasarkan aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Keluarga yang berkualitas berperan penting dalam mencegah stunting, membentuk karakter anak, dan menguatkan ketahanan sosial.

3.2 Sasaran Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, yaitu ”Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, dan Kualitas Keluarga”, maka ditetapkan empat sasaran strategis yang menjadi landasan utama pelaksanaan program dan kegiatan.

1. **Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender**, yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor. Indikator kinerja utama untuk sasaran ini adalah **”Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah”**, yang mencerminkan komitmen dan capaian pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
2. **Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**, yang diarahkan untuk memperkuat sistem perlindungan, menjamin hak-hak dasar anak. Serta menurunkan angka kekerasan berbasis gender. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah ”**Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)”,** untuk mengintegrasikan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui sistem pembangunan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

dan ”**Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak”** untuk mengukur efektivitas upaya penanganan dan perlindungan terhadap korban, serta mengevaluasi keberhasilan program pemerintah dan lembaga terkait dalam menyelesaikan kasus tersebut.

3. **Meningkatnya Keluarga Sejahtera (KS)**, yang difokuskan pada peningkatan kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam pembentukan SDM unggul. Indikator untuk sasaran ini adalah ”**Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)”**, yang mencerminkan tingkat pengendalian kelahiran dan keberhasilan program Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga yang sehat, terencana dan berkualitas.
4. **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah** dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat, yang didukung oleh pengembangan sistem informasi dan teknologi, penajaman program reformasi birokrasi, serta evaluasi kinerja yang terstruktur untuk memastikan pelyanan publik yang efektif dan terpercaya. Indikator untuk sasaran ini adalah ”**Predikat Nilai AKIP**” yang menunjukkan kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan tugasnya. Predikat tersebut menggambarkan seberapa efektif instansi dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya secara akuntabel, serta sejauh mana kinerja tersebut berdampak pada tujuan pembangunan.

3.3 Strategi Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong

Dalam mendukung prioritas nasional yaitu pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini sesuai dengan regulasi dari pusat seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2008, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, Inpres Tahun 2000 dan 8 Misi Presiden dan

Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 yang tertuang pada Misi ke-4 yaitu : ***"Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas"***.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi nasional yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan. PUG bukan sekedar program, melainkan pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagai penggerak pelaksanaan PUG di daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabalong terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan tujuan "***Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga***".

Strategi merupakan tindakan yang diambil atau rencana aksi dinas untuk mencapai tujuan organisasi atau dinas. Selain itu strategi dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang ingin ditangani. Berikut adalah strategi yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.1

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

NO	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PERANGKAT DAERAH	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
MISI 3 : Mengembangkan Kehidupan yang Religius				
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan gender	Meningkatkan akses Perempuan terhadap Pendidikan dan peluang ekonomi serta kesetaraan upah	1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota; 2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan; 3. Meningkatkan Kualitas Keluarga; 4. Meningkatkan Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak; 5. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA); 6. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak; 7. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk; 8. Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana (KB); 9. Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).	

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	86,47	86,47	86,97	87,47	87,97	88,47	88,97	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	64,9	65	65,3	65,6	65,9	66,5	66,7	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	67,1	67,1	67,25	67,4	67,6	67,8	68	
		Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (Nilai)	630	630-650	650-670	670-700	700-710	710-730	730-750	
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)	645	650	725	750	775	800	825	
			Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	71,1	71,3	71,8	72	72,3	72,8	73	

		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	A	A	A	A	

Tabel 3.3

Tahapan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Peningkatan kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Peningkatan kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Perluasan kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Penguatan kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Pemantapan kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan
Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan	Peningkatan Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan	Perluasan Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan	Penguatan Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan	Pemantapan Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan
Peningkatan kualitas keluarga dalam mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan kualitas keluarga dalam mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Perluasan kualitas keluarga dalam mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Penguatan Kualitas keluarga dalam mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemantapan Kualitas keluarga dalam mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak
Peningkatan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Peningkatan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Perluasan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Penguatan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Pemantapan Pemanfaatan Data Gender dan Anak
Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Peningkatan Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Perluasan Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Penguatan Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Pemantapan Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif
Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Perluasan Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Penguatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Pemantapan Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak
Pengendalian Pertambahan Jumlah	Peningkatan Pengendalian Pertambahan	Perluasan Pengendalian Pertambahan	Penguatan Pengendalian Pertambahan	Pemantapan Pengendalian

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Pertambahan Jumlah Penduduk
Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Perluasan Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penguatan Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemantapan Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Peningkatan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Perluasan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Penguatan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Pemantapan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)

3.4 Arah Kebijakan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Tabalong

Arah Kebijakan Renstra 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Lebih lanjut kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap, yang selaras dengan strategi. Arah kebijakan Renstra yang dipilih untuk mewujudkan misi pembangunan Kabupaten Tabalong, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.4.

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tabalong

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pembentukan dan penguatan kelompok kerja (Pokja) PUG di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Penunjukan dan penguatan peran focal point gender di tiap perangkat daerah	
			Pelatihan dan bimbingan teknis tentang PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	
			Sosialisasi regulasi dan pedoman teknis tentang PUG	
			Penguatan sistem pelaporan berbasis gender di tiap perangkat daerah	
			Integrasi gender dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, Renja, RKPD)	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			Penerapan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam program/kegiatan.	
		Meningkatkan Perlindungan Perempuan	Penyusunan dan penegakan regulasi terkait perlindungan perempuan	
			Integrasi kebijakan perlindungan Perempuan ke dalam peraturan daerah dan program pemerintah	
			Pengembangan layanan pengaduan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender	
			Penyediaan fasilitas layanan terpadu bagi Perempuan (UPTD PPA) korban kekerasan di tingkat Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi tentang hak Perempuan dan perlindungan dari kekerasan	
			Monitoring kasus kekerasan terhadap Perempuan dan penanganannya secara berkala	
			Evaluasi efektivitas program perlindungan Perempuan untuk perbaikan berkelanjutan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			Penguatan sinergi antara pemerintah, LSM, komunitas Perempuan dan sektor swasta.	
		Meningkatkan Kualitas Keluarga	Pengembangan SDM PUSPAGA (psikolog, konselor, fasilitator) dengan perspektif gender dan hak anak	
			Penyediaan sarana prasarana layanan yang inklusif, aman dan ramah keluarga	
			Pelayanan konselig keluarga terkait relasi suami-istri, pengasuhan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan peran ayah	
			Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	
			Mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak	
			Menjadi ruang ramah keluarga	
		Meningkatkan Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Memmbangun dan mengembangkan sistem informasi yang mengintegrasikan data gender dan anak secara komprehensif di tingkat kabupaten/kota	
			Memastikan interoperabilitas data antar perangkat daerah	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			dan instansi terkait	
			Pelatihan dan pembinaan data bagi petugas pengelola data terkait pengumpulan, pengolahan, dan analisis data gender dan anak	
			Penyediaan panduan teknis pengelolaan data yang responsive gender dan ramah anak	
			Melakukan validasi dan verifikasi data secara berkala untuk menjamin kualitas dan keakuratan data	
			Menggunakan data gender dan anak sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan Keputusan di tingkat daerah	
			Melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data gender dan anak	
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Integrasi hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah	
			Penetapan dan penerapan kebijakan ramah anak di	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			tingkat kabupaten/kota melalui Perda tentang Perlindungan Anak	
			Menjamin akses anak terhadap Pendidikan, layanan Kesehatan dan gizi yang layak	
			Pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak	
			Penguatan sistem perlindungan anak berbasis Masyarakat dan keluarga	
			Mendorong pembentukan forum anak dan pelibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah	
			Memberi ruang aman bagi aman bagi anak dan pelibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah	
			Memberi ruang aman bagi anak untuk menyampaikan aspirasi	
			Penguatan sinergi antar SKPD, Lembaga non-pemerintah, dan dunia usaha dalam mendukung	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			pemenuhan hak anak	
			Pelaporan rutin dan evaluasi implementasi pemenuhan haka nak secara partisipatif	
		Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	Penyusunan regulasi tentang perlindungan khusus anak	
			Penguatan kelembagaan dan anggaran untuk perlindungan anak di Kabupaten/Kota	
			Pengembangan layanan rehabilitasi, pendampingan hukum, dan psikososial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	
			Penyelenggaraan tempat ramah anak semnetra (shelter), rumah aman, dan Lembaga rehabilitasi	
			Pelatihan bagi apparat penegak hukum, petugas sosial, guru dan tenaga Kesehatan mengenai penanganan kasus anak secara holistik	
			Penguatan peran UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			Mendorong peran aktif Masyarakat dan keluarga dalam melaporkan serta mencegah kekerasan terhadap anak	
			Pengumpulan dan pelaporan data kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus	
		Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Integrasi isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah	
			Sosialisasi pengendalian penduduk melalui media massa, komunitas, dan Pendidikan formal/informal	
			Pengumpulan dan pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan terupdate melalui Data Kependudukan dan Keluarga _ New SIGA, Sistem Informasi Keluarga	
			Pemanfaatan data untuk pemetaan wilayah prioritas dan pengambilan kebijakan yang tepat	
			Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	
		Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penyediaan akses yang mudah terhadap layanan dan alat kontrasepsi modern	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			Penyuluhan tentang pentingnya pengaturan kelahiran dan perencanaan keluarga	
			Peningkatan cakupan peserta KB, terutama di daerah dengan TFR (Total Fertility Rate) tinggi	
			Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang aman, terjangkau, dan berkualitas	
			Melaksanakan penyuluhan tentang manfaat KB bagi keluarga dan pembangunan	
			Memberikan layanan konseling yang sesuai kebutuhan pasangan usia subur (PUS) termasuk remaja dan pasangan muda	
			Mendorong partisipasi aktif kelompok PPKBD, Sub PPKBD, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)	
			Edukasi Kesehatan reproduksi dan KB sejak remaja	
			Pembinaan dan monitoring terhadap petugas lapangan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			KB (PLKB) dan kader di lapangan	
		Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pembinaan ketahanan keluarga melalui pendekatan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)	
			Penguatan peran kader keluarga dalam mendampingi keluarga rentan	
			Pendidikan keluarga tentang pola asuh anak, komunikasi dalam keluarga	
			Mendorong keterlibatan keluarga dalam perencanaan pembangunan desa/ kelurahan	
			Edukasi tentang 8 fungsi Keluarga (agama, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program

Strategi dan arah kebijakan dilaksanakan dengan menyusun rencana program dan kegiatan di masing-masing instansi. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong memiliki beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan dan direncanakan di tahun RPJMD 2025-2029.

Program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sesuai Inmendagri No. 2 tahun 2025 pada periode renstra 2025-2029 ada 10 program terdiri dari :

1. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) ;
6. Program Perlindungan Khusus Anak;
7. Program Pengendalian Penduduk;
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan kewenangan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program tersebut dilaksanakan sesuai dengan Renstra DP3AP2KB Tahun

2025-2029. Indikator capaian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program tersebut meliputi :

1. Nilai Kepuasan terhadap Pelayanan Kesekretariatan;
2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG);
3. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG);
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan;
5. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif;
6. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar;
7. Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan;
8. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA);
9. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA);
10. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif;
11. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD);
12. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun);
13. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR);
14. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut Alat/cara KB Modern;
15. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR);
16. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need);
17. Indeks Lansia Berdaya;
18. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja;
19. Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga.

Adapun keterkaitan antara Sasaran RPJMD serta Indikator RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Program

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					14.856.161.697		16.075.109.300		17.394.071.800		18.821.255.100		20.365.538.700	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.430.493.403		11.286.315.300		12.212.357.400		13.214.381.300		14.298.621.200	
Meningkatnya Kelancaran dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	10.430.493.403	100	11.286.315.300	100	12.212.357.400	100	13.214.381.300	100	14.298.621.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.338.973.409		1.448.836.100		1.567.713.100		1.696.343.900		1.835.528.900	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,421	0,417	0,413	1.338.973.409	0,408	1.448.836.100	0,404	1.567.713.100	0,4	1.696.343.900	0,396	1.835.528.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	52,38	20	28		31		34		37		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	-	60,52	61,63		62,75		63,86		64,97		69,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					559.791.832		605.722.700		655.422.200		709.199.500		767.389.300	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meingkatnya Kualitas Layanan Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	559.791.832	100	605.722.700	100	655.422.200	100	709.199.500	100	767.389.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					834.323.073		902.779.200		976.852.200		1.057.002.900		1.143.729.900	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	100	100	100	834.323.073	100	902.779.200	100	976.852.200	100	1.057.002.900	100	1.143.729.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					225.233.374		243.713.700		263.710.400		285.347.800		308.760.500	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	100	100	100	225.233.374	100	243.713.700	100	263.710.400	100	285.347.800	100	308.760.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					1.059.684.888		1.146.632.000		1.240.713.100		1.342.513.600		1.452.666.800	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,97	61	62	1.059.684.888	63	1.146.632.000	64	1.240.713.100	65	1.342.513.600	66	1.452.666.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					407.661.718		441.110.300		477.303.400		516.466.100		558.842.100	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	83,52	83,6	83,7	407.661.718	88,8	441.110.300	88,9	477.303.400	89	516.466.100	89,1	558.842.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK					3.020.935.803		3.268.803.500		3.537.008.700		3.827.220.100		4.141.243.300	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAN KELUARGA BERENCANA														
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					831.377.440		899.591.900		973.403.400		1.053.271.100		1.139.691.900	
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	10,3	10,3	10,3	831.377.440	10,2	899.591.900	10,2	973.403.400	10,1	1.053.271.100	10,1	1.139.691.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	14,8	14,8	14,4		14		13,6		13,2		12,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Angka)	2,18	2,18	2,17		2,16		2,15		2,14		2,13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.895.685.046		2.051.226.000		2.219.529.000		2.401.641.300		2.598.695.900	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	90,7	90,7	90,75	1.895.685.046	90,8	2.051.226.000	90,85	2.219.529.000	90,9	2.401.641.300	90,95	2.598.695.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (Angka)	79,32	79,5	79,55		79,6		79,65		79,7		79,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	4,79	4,34	3,89		3,43		2,98		2,53		2,08		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					293.873.317		317.985.600		344.076.300		372.307.700		402.855.500	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	67,3	67,3	67,5	293.873.317	67,55	317.985.600	67,6	344.076.300	67,65	372.307.700	67,68	402.855.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	88,8	88,8	88,85		88,9		88,95		88,98		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
TOTAL KESELURUHAN					**17.877.097.500.00**		**19.343.912.800.00**		**20.931.080.500.00**		**22.648.475.200.00**		**24.506.782.000.00**	

4.2. Rencana Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerh;
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Kegiatan yang mendukung Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
   a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
   b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Kegiatan yang mendukung Program Perlindungan Perempuan;
   a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
   c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
   a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
5. Kegiatan yang mendukung Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
   a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Kegiatan yang mendukung Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
   a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
   b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

7. Kegiatan yang mendukung Program Perlindungan Khusus Anak;
   a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
   c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Kegiatan yang mendukung Program Pengendalian Penduduk;
   a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
   b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Kegiatan yang mendukung Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
   a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
   b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
   c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
   d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
10. Kegiatan yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga				Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
					Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)		
		Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender			Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ((%) Indeks)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG) PUG dan Peran Pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksanya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					(Lembaga)	Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Tersedianya Data Terpilah Gender dan Anak dari Produsen Data	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak			Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)		
					Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan terhadap Perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					(Orang)		
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
					Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	
		Meningkatnya Keluarga Sejahtera			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)		
			Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Angka)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersusunya Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
				Tersusunnya Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Cakupan Daerah	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0024 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (Angka)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)		
			Meningkatnya Kelancaran dan		Nilai Kepuasan terhadap pelayanan	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Fungsi Perangkat Daerah		kesekretariatan (%)	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang	2.08.01.2.01.0009 - Pelaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Secara Tertib, Mutakhir dan Terdokumentasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.08.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Tertib dan Efisien	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan Sesuai Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Daerah dan Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Jasa Penunjang Kegiatan yang Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Kondisi Barang Milik Daerah gara Tetap Layak pakai dan Berfungsi Optimal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rencana selama Periode 2025-2029 akan melaksanakan beberapa program. Yang mana di dalam Program tersebut ada rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di jabarkan di tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				14.856.161.697		16.075.109.300		17.394.071.800		18.821.255.100		20.365.538.700		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.430.493.403		11.286.315.300		12.212.357.400		13.214.381.300		14.298.621.200		
Meningkatnya Kelancaran dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	10.430.493.403	100	11.286.315.300	100	12.212.357.400	100	13.214.381.300	100	14.298.621.200	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				380.211.307		404.164.364		431.350.588		456.816.874		488.432.022		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	380.211.307	7	404.164.364	7	431.350.588	7	456.816.874	7	488.432.022		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-		4		4		4		4			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		5.000.000		5.500.000		5.500.000		6.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	0	7	5.000.000	7	5.500.000	7	5.500.000	7	6.000.000		
2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		5.000.000		5.500.000		5.500.000		6.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	6.000.000		
2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		3.500.000		3.700.000		3.800.000		4.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	0	1	3.500.000	1	3.700.000	1	3.800.000	1	4.000.000		
2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		4.000.000		4.500.000		4.600.000		4.700.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	0	1	4.000.000	1	4.500.000	1	4.600.000	1	4.700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		3.500.000		4.000.000		4.100.000		4.200.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	0	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.100.000	1	4.200.000		
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				217.403.912		236.755.037		245.477.120		256.130.563		272.279.993		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	217.403.912	1	236.755.037	1	245.477.120	1	256.130.563	1	272.279.993		
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		5.500.000		6.000.000		6.500.000		6.500.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	0	4	5.500.000	4	6.000.000	4	6.500.000	4	6.500.000		
2.08.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				82.403.722		70.004.689		77.839.258		82.150.809		88.996.845		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1	82.403.722	1	70.004.689	1	77.839.258	1	82.150.809	1	88.996.845		
2.08.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				80.403.673		70.904.638		78.834.210		88.535.502		95.755.184		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	4	80.403.673	4	70.904.638	4	78.834.210	4	88.535.502	4	95.755.184		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.504.303.000		6.518.803.000		6.519.003.000		7.520.003.000		7.993.520.948		
Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	6.504.303.000	2	6.518.803.000	2	6.519.003.000	2	7.520.003.000	2	7.993.520.948		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	-		65		66		69		70			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	-		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	308	35		40		40		45		45			
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.504.303.000		6.504.303.000		6.504.303.000		7.504.303.000		7.977.020.948		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	308	35	6.504.303.000	40	6.504.303.000	40	6.504.303.000	45	7.504.303.000	45	7.977.020.948		
2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		4.000.000		4.100.000		4.500.000		5.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	-	0	65	4.000.000	66	4.100.000	69	4.500.000	70	5.000.000		
2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		7.000.000		7.100.000		7.200.000		7.500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	0	2	7.000.000	2	7.100.000	2	7.200.000	2	7.500.000		
2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		3.500.000		3.500.000		4.000.000		4.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	-	0	12	3.500.000	12	3.500.000	12	4.000.000	12	4.000.000		
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				97.403.643		118.754.607		130.626.671		143.062.593		141.108.629		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Secara Tertib, Mutakhir dan Terdokumentasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	97.403.643	2	118.754.607	2	130.626.671	4	143.062.593	4	141.108.629		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-		15		16		16		16			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	36	40		40		40		40		40			
2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				97.403.643		103.754.607		114.126.671		116.562.593		114.608.629		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	36	40	97.403.643	40	103.754.607	40	114.126.671	40	116.562.593	40	114.608.629		
2.08.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		5.000.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	0	15	5.000.000	16	6.500.000	16	6.500.000	16	6.500.000		
2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	0	2	10.000.000	2	10.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				764.419.886		1.080.583.225		1.336.031.330		1.152.108.154		1.616.806.773		
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Tertib dan Efisien	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-	764.419.886	-	1.080.583.225	1	1.336.031.330	1	1.152.108.154	1	1.616.806.773		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	90		90		90		90		90			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-			-		1		-		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	50		50		50		50		50			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-		50		-		-		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		250.000.000		0		287.580.588		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-		0	-	0	1	250.000.000	-	0	1	287.580.588		
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				177.795.385		200.165.936		220.324.509		237.760.431		240.806.467		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	50	177.795.385	50	200.165.936	50	220.324.509	50	237.760.431	50	240.806.467		
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		150.000.000		0		0		150.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-	0	50	150.000.000	-	0	-	0	50	150.000.000		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				99.261.858		109.705.732		107.725.353		118.062.593		116.677.425		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	99.261.858	10	109.705.732	10	107.725.353	10	118.062.593	10	116.677.425		
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		10.000.000		10.000.000		20.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-	0	-	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000		
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				487.362.643		581.711.557		707.981.468		746.285.130		756.742.293		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	90	487.362.643	90	581.711.557	90	707.981.468	90	746.285.130	90	756.742.293		
2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		39.000.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-	0	12	39.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000		
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				394.855.075		502.059.392		645.131.029		578.196.757		603.392.407		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan Sesuai Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Daerah dan Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	6	394.855.075	7	502.059.392	8	645.131.029	8	578.196.757	8	603.392.407		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-		1		3		-		-			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-		1		-		1		-			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	10		10		11		11		12			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-		-		1		-		-			
2.08.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		38.000.000		100.000.000		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-	0	1	38.000.000	3	100.000.000	-	0	-	0		
2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		38.000.000		0		38.000.000		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	0	1	38.000.000	-	0	1	38.000.000	-	0		
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				182.451.432		200.554.785		240.666.858		285.854.789		302.522.612		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	10	182.451.432	10	200.554.785	11	240.666.858	11	285.854.789	12	302.522.612		
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				212.403.643		225.504.607		225.504.607		254.341.968		300.869.795		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	6	212.403.643	7	225.504.607	8	225.504.607	8	254.341.968	8	300.869.795		
2.08.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		78.959.564		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	0	-	0	1	78.959.564	-	0	-	0		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.270.839.563		1.502.624.391		1.867.369.144		2.049.040.517		2.132.878.562		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Penunjang Kegiatan yang Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.270.839.563	12	1.502.624.391	12	1.867.369.144	12	2.049.040.517	12	2.132.878.562		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	0	4	20.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000		
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				219.563.643		243.022.607		256.358.071		273.062.593		353.108.629		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	219.563.643	12	243.022.607	12	256.358.071	12	273.062.593	12	353.108.629		
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.051.275.920		1.239.601.784		1.586.011.073		1.750.977.924		1.754.769.933		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.051.275.920	12	1.239.601.784	12	1.586.011.073	12	1.750.977.924	12	1.754.769.933		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.018.460.929		1.159.326.321		1.282.845.638		1.315.153.405		1.322.481.859		
Terpeliharanya Kondisi Barang Milik Daerah gara Tetap Layak pakai dan Berfungsi Optimal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	52	1.018.460.929	52	1.159.326.321	52	1.282.845.638	52	1.315.153.405	52	1.322.481.859		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		-		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	33	35		35		40		40		40			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				516.057.286		644.321.714		704.656.467		704.656.467		704.528.312		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	33	35	516.057.286	35	644.321.714	40	704.656.467	40	704.656.467	40	704.528.312		
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				102.403.643		110.004.607		148.189.171		155.625.093		157.953.547		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	52	102.403.643	52	110.004.607	52	148.189.171	52	155.625.093	52	157.953.547		
2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	400.000.000	1	405.000.000	1	405.000.000	1	405.000.000	1	405.000.000		
2.08.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		25.000.000		49.871.845		55.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0	-	0	1	25.000.000	1	49.871.845	1	55.000.000		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.338.973.409		1.448.836.100		1.567.713.100		1.696.343.900		1.835.528.900		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,421	0,413	1.338.973.409	0,408	1.448.836.100	0,404	1.567.713.100	0,4	1.696.343.900	0,396	1.835.528.900	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	-	61,63		62,75		63,86		64,97		69,41			
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	52,38	28		31		34		37		40			
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				339.355.781		361.328.320		370.056.700		410.829.880		438.666.880		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG) PUG dan Peran Pada Lembaga Pemerintah	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	-	-	339.355.781	-	361.328.320	-	370.056.700	1	410.829.880	-	438.666.880		
	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-		-		-		1		-			
	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	-	-		-		-		-		70			
	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	91		116		141		166		172			
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	-	-		-		-		-		172			
2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				0		0		0		136.943.294		0		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	0	-	0	-	0	1	136.943.294	-	0		
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				339.355.781		361.328.320		370.056.700		136.943.293		146.222.293		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	91	339.355.781	116	361.328.320	141	370.056.700	166	136.943.293	172	146.222.293		
2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		136.943.293		0		
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	-	-	0	-	0	-	0	1	136.943.293	-	0		
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		146.222.294		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	172	146.222.294		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan non pemerintah) (Lembaga)													
2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		146.222.293		
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	70	146.222.293		
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				541.273.208		564.022.300		626.560.660		694.230.260		767.452.180		
Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	-	160	541.273.208	160	564.022.300	160	626.560.660	160	694.230.260	160	767.452.180		
	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	-	160		160		160		160		160			
	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	-	5		-		-		-		-			
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				288.125.929		0		0		0		0		
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	-	5	288.125.929	-	0	-	0	-	0	-	0		
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				253.147.279		266.998.315		298.267.495		332.102.295		368.713.255		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	-	160	253.147.279	160	266.998.315	160	298.267.495	160	332.102.295	160	368.713.255		
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0		297.023.985		328.293.165		362.127.965		398.738.925		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	-	160	0	160	297.023.985	160	328.293.165	160	362.127.965	160	398.738.925		
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				458.344.420		523.485.480		571.095.740		591.283.760		629.409.840		
Terlaksanya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	5	458.344.420	5	523.485.480	5	571.095.740	5	591.283.760	5	629.409.840		
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				339.030.895		319.030.895		319.030.895		352.930.035		371.993.075		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	5	339.030.895	5	319.030.895	5	319.030.895	5	352.930.035	5	371.993.075		
2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				119.313.525		204.454.585		252.064.845		238.353.725		257.416.765		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	1	1	119.313.525	1	204.454.585	1	252.064.845	1	238.353.725	1	257.416.765		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				559.791.832		605.722.700		655.422.200		709.199.500		767.389.300		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	559.791.832	100	605.722.700	100	655.422.200	100	709.199.500	100	767.389.300	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				251.472.221		278.952.044		295.518.543		313.444.311		332.840.911		
Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	251.472.221	1	278.952.044	1	295.518.543	1	313.444.311	1	332.840.911		
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	-	-		-		1		-		-			
2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		16.566.499		0		0		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	-	-	0	-	0	1	16.566.499	-	0	-	0		
2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				251.472.221		278.952.044		278.952.044		313.444.311		332.840.911		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	251.472.221	1	278.952.044	1	278.952.044	1	313.444.311	1	332.840.911		
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				157.722.175		169.013.797		179.399.931		197.325.697		216.722.297		
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	16	20	157.722.175	-	169.013.797	-	179.399.931	-	197.325.697	-	216.722.297		
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	16	-		21		22		23		24			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				157.722.175		0		0		0		0		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	16	20	157.722.175	-	0	-	0	-	0	-	0		
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		169.013.797		179.399.931		197.325.697		216.722.297		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	16	-	0	21	169.013.797	22	179.399.931	23	197.325.697	24	216.722.297		
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.597.436		157.756.859		180.503.726		198.429.492		217.826.092		
Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	-	40	150.597.436	45	157.756.859	50	180.503.726	50	198.429.492	50	217.826.092		
	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	-	-		-		-		-		50			
2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				150.597.436		157.756.859		180.503.726		198.429.492		198.429.492		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	-	40	150.597.436	45	157.756.859	50	180.503.726	50	198.429.492	50	198.429.492		
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		19.396.600		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	50	19.396.600		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				834.323.073		902.779.200		976.852.200		1.057.002.900		1.143.729.900		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	100	100	834.323.073	100	902.779.200	100	976.852.200	100	1.057.002.900	100	1.143.729.900	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				564.429.758		610.067.175		655.900.420		709.334.220		767.152.220		
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	-	564.429.758	-	610.067.175	-	655.900.420	12	709.334.220	1	767.152.220		
	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	1	-		-		-		1		1			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	10		10		10		10		10			
2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0		0		0		18.400.000		0		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	-	0	-	0	-	0	12	18.400.000	1	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		20.000.000		39.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	1	-	0	-	0	-	0	1	20.000.000	1	39.000.000		
2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				317.783.495		340.602.204		361.744.448		370.061.348		417.370.348		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	10	317.783.495	10	340.602.204	10	361.744.448	10	370.061.348	10	417.370.348		
2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				246.646.263		269.464.971		294.155.972		300.872.872		310.781.872		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	-	1	246.646.263	1	269.464.971	1	294.155.972	1	300.872.872	1	310.781.872		
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				269.893.315		292.712.025		320.951.780		347.668.680		376.577.680		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	-	6	269.893.315	12	292.712.025	12	320.951.780	12	347.668.680	5	376.577.680		
	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	-		-		12		-		-			
	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-		-		-		-		2			
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	-		-		-		5		-			
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	-		6		-		-		-			
2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		50.000.000		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	2	50.000.000		
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0		50.000.000		0		0		0		
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	-	0	6	50.000.000	-	0	-	0	-	0		
2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		20.951.780		0		0		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	-	0	-	0	12	20.951.780	-	0	-	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				269.893.315		242.712.025		300.000.000		327.668.680		326.577.680		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	-	6	269.893.315	12	242.712.025	12	300.000.000	12	327.668.680	5	326.577.680		
2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		20.000.000		0		
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	-	0	-	0	-	0	5	20.000.000	-	0		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				225.233.374		243.713.700		263.710.400		285.347.800		308.760.500		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	100	100	225.233.374	100	243.713.700	100	263.710.400	100	285.347.800	100	308.760.500	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				225.233.374		243.713.700		263.710.400		285.347.800		308.760.500		
Tersedianya Data Terpilah Gender dan Anak dari Produsen Data	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	225.233.374	1	243.713.700	1	263.710.400	1	285.347.800	1	308.760.500		
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				225.233.374		243.713.700		263.710.400		285.347.800		308.760.500		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	225.233.374	1	243.713.700	1	263.710.400	1	285.347.800	1	308.760.500		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				1.059.684.888		1.146.632.000		1.240.713.100		1.342.513.600		1.452.666.800		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,97	62	1.059.684.888	63	1.146.632.000	64	1.240.713.100	65	1.342.513.600	66	1.452.666.800	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				307.092.647		335.985.017		367.345.383		401.278.883		450.576.173		
Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	12	307.092.647	12	335.985.017	12	367.345.383	12	401.278.883	12	450.576.173		
	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	-		-		40		-		-				
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				307.092.647		335.985.017		335.985.017		401.278.883		450.576.173		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	12	307.092.647	12	335.985.017	12	335.985.017	12	401.278.883	12	450.576.173		
2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		31.360.366		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	-	0	-	0	40	31.360.366	-	0	-	0		
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				752.592.241		810.646.983		873.367.717		941.234.717		1.002.090.627		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	-	752.592.241	-	810.646.983	143	873.367.717	-	941.234.717	-	1.002.090.627		
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	240	240		240		240		240		240			
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				321.325.484		350.307.855		381.668.222		455.601.722		490.747.010		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	240	240	321.325.484	240	350.307.855	240	381.668.222	240	455.601.722	240	490.747.010		
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				431.266.757		460.339.128		460.339.128		485.632.995		511.343.617		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	-	1	431.266.757	1	460.339.128	1	460.339.128	1	485.632.995	1	511.343.617		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		31.360.367		0		0		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	-	0	-	0	143	31.360.367	-	0	-	0		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				407.661.718		441.110.300		477.303.400		516.466.100		558.842.100		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	407.661.718	100	441.110.300	100	477.303.400	100	516.466.100	100	558.842.100	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	83,52	83,7		88,8		88,9		89		89,1			
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				213.364.478		230.088.769		208.185.319		217.766.669		240.718.069		
Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	-	1	213.364.478	1	230.088.769	1	208.185.319	1	217.766.669	1	240.718.069		
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	-	-		240		-		-		-			
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	-	-		1		-		-		-			
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				213.364.478		200.088.769		208.185.319		217.766.669		240.718.069		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	-	1	213.364.478	1	200.088.769	1	208.185.319	1	217.766.669	1	240.718.069		
2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				0		15.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	-	-	0	1	15.000.000	-	0	-	0	-	0		
2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				0		15.000.000		0		0		0		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	-	-	0	240	15.000.000	-	0	-	0	-	0		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				194.297.240		211.021.531		229.118.081		248.699.431		265.124.031		
Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	45	-	194.297.240	47	211.021.531	48	229.118.081	48	248.699.431	49	265.124.031		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	45	47		-		-		-		-			
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				194.297.240		0		0		0		0		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	45	47	194.297.240	-	0	-	0	-	0	-	0		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		211.021.531		229.118.081		248.699.431		265.124.031		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	45	-	0	47	211.021.531	48	229.118.081	48	248.699.431	49	265.124.031		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		40.000.000		50.000.000		53.000.000		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	-	-	0	-	0	-	40.000.000	-	50.000.000	90	53.000.000		
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	-	-		-		1		-		-			
	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	-	-		-		1		-		-			
	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	-	-		-		-		240		0			
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				0		0		20.000.000		0		0		
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	-	-	0	-	0	1	20.000.000	-	0	-	0		
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				0		0		20.000.000		0		0		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	-	-	0	-	0	1	20.000.000	-	0	-	0		
2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		50.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	-	-	0	-	0	-	0	240	50.000.000	0	0		
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai				0		0		0		0		53.000.000		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	90	53.000.000		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.020.935.803		3.268.803.500		3.537.008.700		3.827.220.100		4.141.243.300		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				831.377.440		899.591.900		973.403.400		1.053.271.100		1.139.691.900		
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	10,3	10,3	831.377.440	10,2	899.591.900	10,2	973.403.400	10,1	1.053.271.100	10,1	1.139.691.900	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	14,8	14,4		14		13,6		13,2		12,8			
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Angka)	2,18	2,17		2,16		2,15		2,14		2,13			
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				342.949.724		368.542.740		397.666.263		429.613.343		464.181.663		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunya Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	342.949.724	2	368.542.740	-	397.666.263	-	429.613.343	-	464.181.663		
	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	10	10		10		10		10		10			
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana				208.478.024		208.478.024		235.708.710		251.682.250		268.966.410		
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	10	10	208.478.024	10	208.478.024	10	235.708.710	10	251.682.250	10	268.966.410		
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				0		25.593.016		0		0		0		
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	0	2	25.593.016	-	0	-	0	-	0		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				134.471.700		134.471.700		161.957.553		177.931.093		195.215.253		
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	1	1	134.471.700	1	134.471.700	1	161.957.553	1	177.931.093	1	195.215.253		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				488.427.716		531.049.160		575.737.137		623.657.757		675.510.237		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Cakupan Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	-	-	488.427.716	12	531.049.160	-	575.737.137	-	623.657.757	-	675.510.237		
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	12	-		-		-		12		-			
	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	12		12		12		12					
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0		14.714.987		0		0		0		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	-	-	0	12	14.714.987	-	0	-	0	-	0		
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0		0		0		15.973.540		0		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	12	-	0	-	0	-	0	12	15.973.540	-	0		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				197.937.275		197.937.275		225.423.129		225.423.129		258.680.829		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	12	197.937.275	12	197.937.275	12	225.423.129	12	225.423.129		258.680.829		
2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana				127.131.679		144.957.324		156.915.879		172.889.419		190.173.579		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	12	12	127.131.679	12	144.957.324	12	156.915.879	12	172.889.419	12	190.173.579		
2.14.02.2.02.0024 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				163.358.762		173.439.574		193.398.129		209.371.669		226.655.829		
Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	3	3	163.358.762	3	173.439.574	3	193.398.129	3	209.371.669	3	226.655.829		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.895.685.046		2.051.226.000		2.219.529.000		2.401.641.300		2.598.695.900		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	90,7	90,75	1.895.685.046	90,8	2.051.226.000	90,85	2.219.529.000	90,9	2.401.641.300	90,95	2.598.695.900	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (Angka)	79,32	79,55		79,6		79,65		79,7		79,75			
	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	4,79	3,89		3,43		2,98		2,53		2,08			
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				125.585.729		159.783.895		208.102.680		240.570.158		302.013.091		
Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	125.585.729	1	159.783.895	1	208.102.680	1	240.570.158	1	302.013.091		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1	-		1		-		-		-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	-		-		-		1		-			
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	-		-		1		-		-			
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	30	-		-		-		-		6			
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				0		34.198.166		0		0		0		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1	-	0	1	34.198.166	-	0	-	0	-	0		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				0		0		50.000.000		0		0		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	-	0	-	0	1	50.000.000	-	0	-	0		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				0		0		0		40.570.158		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	-	0	-	0	-	0	1	40.570.158	-	0		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				125.585.729		125.585.729		158.102.680		200.000.000		257.000.000		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	125.585.729	1	125.585.729	1	158.102.680	1	200.000.000	1	257.000.000		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0		0		0		0		45.013.091		
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	30	-	0	-	0	-	0	-	0	6	45.013.091		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				924.546.939		978.371.102		1.046.599.095		1.099.549.631		1.138.480.423		
Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	938	950	924.546.939	950	978.371.102	950	1.046.599.095	950	1.099.549.631	950	1.138.480.423		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				924.546.939		978.371.102		1.046.599.095		1.099.549.631		1.138.480.423		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	938	950	924.546.939	950	978.371.102	950	1.046.599.095	950	1.099.549.631	950	1.138.480.423		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				738.042.451		791.363.485		828.577.727		910.356.353		976.675.253		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	-	738.042.451	-	791.363.485	-	828.577.727	1	910.356.353	-	976.675.253		
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1.500	952		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	-		12		-		-		-			
	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	-	-		-		1		-		-			
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0		15.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	-	0	12	15.000.000	-	0	-	0	-	0		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				355.241.932		372.783.293		340.000.000		461.626.588		503.431.735		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1.500	952	355.241.932	1.000	372.783.293	1.000	340.000.000	1.000	461.626.588	1.000	503.431.735		
2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				0		0		53.044.368		0		0		
Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	-	-	0	-	0	1	53.044.368	-	0	-	0		
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				382.800.519		403.580.192		435.533.359		435.533.359		473.243.518		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	5	5	382.800.519	5	403.580.192	5	435.533.359	5	435.533.359	5	473.243.518		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0		0		0		13.196.406		0		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	-	0	-	0	-	0	1	13.196.406	-	0		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				107.509.927		121.707.518		136.249.498		151.165.158		181.527.133		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	18	-	107.509.927	-	121.707.518	18	136.249.498	-	151.165.158	-	181.527.133		
	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	-		-		-		1		-			
	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	24	24		24		24		24		24			
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				107.509.927		121.707.518		121.707.518		141.165.158		181.527.133		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	24	24	107.509.927	24	121.707.518	24	121.707.518	24	141.165.158	24	181.527.133		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				0		0		14.541.980		0		0		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	18	-	0	-	0	18	14.541.980	-	0	-	0		
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				0		0		0		10.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	-	0	-	0	-	0	1	10.000.000	-	0		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				293.873.317		317.985.600		344.076.300		372.307.700		402.855.500		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	67,3	67,5	293.873.317	67,55	317.985.600	67,6	344.076.300	67,65	372.307.700	67,68	402.855.500	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	88,8	88,85		88,9		88,95		88,98		90			
	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	100	100		100		100		100		100			
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				174.716.658		186.772.800		199.818.150		219.901.800		229.207.750		
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	12	1	174.716.658	1	186.772.800	1	199.818.150	1	219.901.800	1	229.207.750		
	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	7	-		7		-		-		-			
	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	-	-		-		-		1		-			
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	25	-		-		10		-		-			
2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL				0		0		0		19.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	-	-	0	-	0	-	0	1	19.000.000	-	0		
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				0		20.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	7	-	0	7	20.000.000	-	0	-	0	-	0		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				174.716.658		166.772.800		174.818.150		200.901.800		229.207.750		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	12	1	174.716.658	1	166.772.800	1	174.818.150	1	200.901.800	1	229.207.750		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0		0		25.000.000		0		0		
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	25	-	0	-	0	10	25.000.000	-	0	-	0		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				119.156.659		131.212.800		144.258.150		152.405.900		173.647.750		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2	-	119.156.659	1	131.212.800	-	144.258.150	-	152.405.900	-	173.647.750		
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	1	-		-		1		-		-			
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				0		0		24.101.491		0		0		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	1	-	0	-	0	1	24.101.491	-	0	-	0		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				0		12.056.141		0		0		0		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2	-	0	1	12.056.141	-	0	-	0	-	0		
2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				119.156.659		119.156.659		120.156.659		152.405.900		173.647.750		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	1	1	119.156.659	1	119.156.659	1	120.156.659	1	152.405.900	1	173.647.750		

4.4 Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas

Ada rencana sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas dalam menunjang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam hal ini Indikator Utama dapat dilihat di tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4
Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
			2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
			2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan terhadap Perempuan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
			2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
4.	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
5.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
6.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
			2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
			2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	
7.	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduki	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
			2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
			2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
			2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
			2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
			2.14.02.2.02.0024 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	
8.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
			2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
			2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
			2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
9.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
			2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
			2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	

4.5 Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB

Ada rencana Indikator Kinerja Utama beserta target dalam menunjang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam hal ini Indikator Utama dapat dilihat di tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,47	86,47	86,97	87,47	87,97	88,47	88,97	
2.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,9	65	65,3	65,6	65,9	66,5	66,7	
3.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67,1	67,1	67,25	67,4	67,6	67,8	68	
4.	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	645	650	725	750	775	800	825	
5.	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	630	630-650	650-670	670-700	700-710	710-730	730-750	
7.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	71,1	71,3	71,8	72	72,3	72,8	73	
8.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A	A	

4.6 Indikator Kinerja Kunci DP3AP2KB

Adapun rencana dan target Indikator Kinerja Kunci urusan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dapat dilihat di tabel :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
1.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	positif	%	52,38	20	28	31	34	37	40	
3.	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	positif	%	0.01:0.02	0.02:0.02	0.02:0.02	0.02:0.02	0.02:0.03	0.03:0.03	0.03:0.03	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
4.	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	negatif	%	4,79	4,34	3,89	3,43	2,98	2,53	2,08	
5.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	negatif	Angka	2,18	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
6.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	positif	%	79,61	81,78	83,95	86,13	88,3	90,48	92,65	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis 2025-2029 DP3AP2KB Kabupaten Tabalong merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang berfungsi sebagai acuan arah pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dokumen Renstra DP3AP2KB 2025-2029 dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tabalong. Untuk itu diperlukan dukungan penuh dari anggaran dan semua aparatur DP3AP2KB Kabupaten Tabalong.

Dengan demikian, dokumen Renstra yang telah disesuaikan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Tabalong, serta komitmen dan kolaborasi dari seluruh aspek dalam pembangunan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana demi tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tabalong.